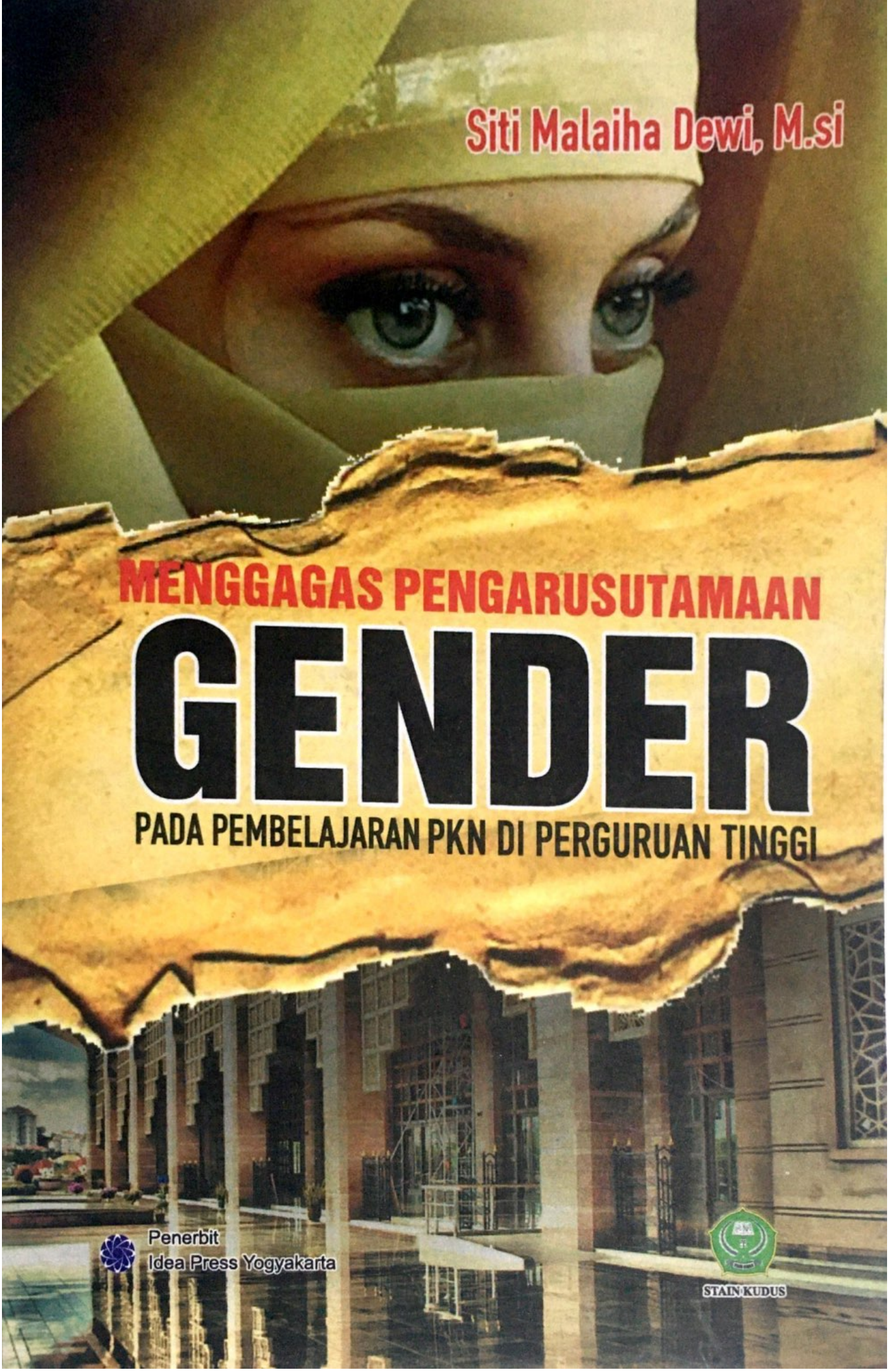

Dipindai dengan CamScanner

MENGGAGAS PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA PEMBELAJARAN PKN DI PERGURUAN TINGGI

Siti Malaiha Dewi, M.Si

Penerbit
Idea Press Yogyakarta

Dipindai dengan CamScanner

MENGGAGAS PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA PEMBELAJARAN PKN DI PERGURUAN TINGGI

Dipindai dengan CamScanner

Perpustakaan Nasional RI
Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Menggagas Pengarusutamaan Gender
Pada Pembelajaran PKN di Perguruan Tinggi
/Siti Malaikha Dewi . I Yogyakarta. 2012. XII+132 hlm

ISBN: 978-602-8795-17-3

Penulis: Siti Malaikha Dewi, M.Si
Seting Layot: Idea Press
Desain Cover: Fathuroji

Cetakan Pertama, Nopember 2012

Diterbitkan oleh
IDEA Press (Anggota IKAPI)
Alamat: Diro RT.58 Jln. Amarta, Pendowoharjo
Sewon Bantul Yogyakarta 55002
Telp/Fax. (0274) 6466541
Email: idea_press@yahoo.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dipindai dengan CamScanner

Pengantar Penulis

Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu materi muatan kurikulum yang wajib diberikan pada semua program studi di perguruan Tinggi.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus yang merupakan perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia pun menjadikan PKn sebagai mata kuliah wajib di semua program studi yang ada.

Tujuan mata kuliah PKn antara lain: (a) Membentuk kecakaan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat; (b) Menghasilkan mahasiswa yang berpikir kritis dan bertindak demokratis; (c) Mengembangkan pada diri mahasiswa kultur demokrasi; (d) Mampu membentuk mahasiswa menjadi *good and responsible citizen* (warganegara yang baik dan bertanggung jawab) melalui penanaman moral dan keterampilan *(social skills)* sehingga kelak mereka mampu memahami dan memecahkan persoalan-persoalan aktual kewarganegaraan.

Orientasi pembelajaran PKn adalah orientasi humanistik yang mendasarkan pada asumsi bahwa peserta didik adalah makhluk manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Karena itu dalam pandangan ini peserta didik (mahasiswa) ditempatkan

Dipindai dengan CamScanner

sebagai subyek sekaligus obyek pembelajaran; dosen diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog peserta didik; materi pembelajaran disusun berdasarkan kebutuhan dasar (*basic needs*) peserta didik, bersifat fleksibel, dinamis dan fenomenologis sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan memiliki relevansi dengan tuntutan dan perubahan sosial. Model materi pembelajaran tersebut mendorong terciptanya kelas pembelajaran Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*) yang hidup *(life classroom)* manajemen pendidikan dan pembelajaran menekankan pada dimensi desentralistik, tidak birokratis, mengakui pluralitas dengan strategi pembelajaran yang bervariasi dan demokratis. Untuk itu kelas pembelajaran Pendidikan Kewargaan diperlakukan meminjam istilah Udin S. Winataputra sebagai laboratorium demokrasi di mana semangat kewarganegaraan yang memancar dari cita-cita dan nilai demokrasi diterapkan secara interaktif.

Selanjutnya pengalaman pembelajaran yang berorientasi humanistik membuat peserta didik menemukan jati dirinya *(learning to be)* sebagai manusia yang sadar akan tanggung jawab individu dan sosial. Pengetahuan dan kesadaran diri yang tercipta dari hasil pembelajaran tersebut mendorong kepada peserta untuk melakukan sesuatu *(learning to do)* yang didasari oleh pengetahuan yang dimilikinya. Apa yang dilakukan oleh peserta didik dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama *(learning to live together).* Kehidupan bersama tersebut dibangun atas dasar kesadaran akan realitas keragaman dan saling memerlukan sebagai warga negara. *Learning to live together* menjadi penting khususnya menghadapi dunia yang penuh konflik dan banyaknya pelanggaran HAM. Kehidupan

Dipindai dengan CamScanner

yang damai ini bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi masyarakat, orang tua, siswa/mahasiswa, guru/dosen dan semua pihak. Dalam lingkup Asia-Pasifik yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa, tatanan geografis, sosio-politik, agama, dan tingkat ekonomi kaum muda perlu diajarkan kepada keindahan dari keragaman kultural ini. *Learning to live together* dalam globalisasi yang kooperatif tetapi sekaligus juga pelestarian nilai-nilai budaya dan kemanusian sedemikian sehingga ada usaha bersama untuk saling mengasihi dalam kehidupan bersama. Dengan demikian pembelajaran Pendidikan Kewargaan baik sebagai pendidikan demokrasi maupun sebagai pendidikan HAM mensyaratkan situasi pembelajaran yang interaktif, empiris, kontekstual, kasuistis dan demokratis.

Terlepas dari apa yang dicita-citakan dan direncanakan di atas, ternyata berdasarkan penelitian penulis hal di atas tidaklah mudah diwijudkan. Ada beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi, antara lain: 1) Keaktifan mahasiswa perempuan lebih rendah dibandingkan mahasiswa laki-laki. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesempatan bagi mahasiswi perempuan untuk membaca di rumah sehingga penguasaan materi kurang, mahasiswa perempuan takut berbicara di depan umum karena tidak biasa bicara di depan umum, dan suara perempuan juga pelan; 2) Ada sebagian dosen yang dalam pembelajaran memberikan akses yang lebih kepada mahasiswa laki-laki dibanding mahasiswa perempuan dan ada sebagian dosen yang netral gender dalam memberikan akses pada saat pembelajaran PKn, dan dalam pelaksanaanya cenderung bias gender. Hal ini terjadi karena dosen belum memiliki pemahaman tentang kesetaraan dan

Dipindai dengan CamScanner

keadilan gender atau belum responsive gender; 3) Sebagian besar materi PKn netral gender dan potensial menjadi bias gender. Hal ini terjadi karena dosen pengampu tidak memiliki latar belakang pemahaman gender.

Fakta-fakta di atas menginspirasi penulis untuk menggagas bagaimana PKn diajarkan dengan pendekatan *gender mainstreaming* atau pengarusutamaan gender (PUG) yang didefinisikan sebagai suatu strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan pembangunan (Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000).

Wujud dari PUG disini adalah terciptanya Pembelajaran Responsif Gender (PRG), yaitu pembelajaran yang memasukkan dimensi keadilan dan kesetaraan gender pada: perencanaan/persiapan pembelajaran PKn, pelaksanaan/ proses pembelajaran Pkn serta evaluasi pembelajaran PKn, termasuk tersusunya bahan ajar Pkn yang secara eksplisit memuat tentang materi gender, dan secara integral menjadi ruh semua materi PKn. Semoga bisa!!!

Tanpa bantuan berbagai pihak, buku ini tentu tidak akan terwujud. Maka sudah menjadi keharusan bagi saya untuk menghaturkan terima kasih kepada Ketua STAIN Kudus dan kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAIN Kudus yang telah memberikan akses dan kesempatan penulisan karya ilmiah ini. *Crew* Lembaga

Dipindai dengan CamScanner

Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan Kudus (L@PPiS); sahabat-sahabat di Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Kudus dan Forum PSG/W Jawa Tengah: '*Thanks* atas persahabatan yang indah selama ini'.

Terima kasih juga untuk putri-putri saya, 'Dinar NF' & Aisya Aulia Ramadhani, serta Pap'S yang telah men-*support* dengan caranya masing-masing. Dan, kepada seluruh aktivis perempuan yang tak kenal lelah memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender, semoga tulisan ini bisa menjadi tambahan amunisi baik secara konseptual maupun kontekstual. Amiin.

Kudus, Nopember 2012

Siti Malaiha Dewi

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis
Daftar Isi

BAB I : SELAYANG PANDANG TENTANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN)

A. Urgensi PKn di Perguruan Tinggi 1
B. Istilah & Definisi PKN 9
C. Kompetensi Dasar & Tujuan PKN 12
D. Orientasi PKN 14
E. Ruang Lingkup Materi PKN 17

BAB 2 : PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI: STUDI KASUS DI STAIN KUDUS

A. Profil STAIN Kudus 21
B. Definisi Pembelajaran 28
C. Pelaksanaan Pembelajaran PKN di STAIN Kudus 39

BAB 3 : BIAS GENDER PADA PEMBELAJARAN PKN: Studi Kasus di STAIN Kudus

A. Konsep Dasar tentang Gender 61
B. Permasalahan Gender pada Pembelajaran PKN di STAIN Kudus Tahun Akademik 2012/ 2013 .. 85

Dipindai dengan CamScanner

BAB 4 :PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA PEMBELAJARAN PKN DI STAIN KUDUS

A. Kebutuhan Gender pada Pembelajaran PKN . 113
B. Sekilas tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) 115
C. PUG Bidang Pendidikan Menuju Pendidikan Berwawasan Gender (PWG) 119

Daftar Pustaka 129

Lampiran:

1. Inpres No. 9 Tahun 2000
2. Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 2008

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

SELAYANG PANDANG TENTANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN)

A. Urgensi PKN di Perguruan Tinggi

Pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan kewargaan yang merupakan terjemahan dari *civic education* merupakan mata kuliah yang wajib diberikan pada semua jenjang pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat 2 yang berbunyi: "Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia".

Selain menjadi sebuah keharusan karena dijamin oleh perundangan, pendidikan kewarganegaraan menjadi penting dan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak karena beberapa hal sebagaimana diungkapkan oleh Azumardi Azra sebagai berikut:[1] *Pertama,* meningkatnya gejala dan kecenderungan *political literacy*, tidak melek politik dan

---

[1] Tim ICCE, *Civic Education*: *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan The Asia Foundation., 2003, hlm. 17

Dipindai dengan CamScanner

tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara. *Political literacy* terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan warga akan proses demokrasi. *Kedua,* meningkatnya *political apathism* yang ditandai dengan sedikitnya keterlibatan warganegara dalam proses-proses politik. Minimnya keterlibatan warganegara dapat dilihat dari angka partisipasi pemilihan umum (Pemilu) dari tahun ke tahun baik pemilu presiden, anggota DPR, DPRD, bupati, maupun kepala desa tidak ada yang sampai 100 persen. Bahkan, partisipasi yang selama ini sudah terjadi pun patut dipertanyakan karena banyak yang berpartisipasi pada pemilu karena dimobilisasi oleh calon dengan bantuan-bantuan maupun serangan fajar. Namun, proses politik yang dimaksud disini tidak hanya pada saat proses pemilihan umum saja, tetapi politik disini dimaknai sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud pada proses pembuatan keputusan maupun kebijakan publik.[2] *Political apathism*

David Easton dalam buku *The Political System* dan dikutip oleh Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2009, hlm. 20 menyatakan bahwa kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwewenang. Sedangkan kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh Thomas R. Dye adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kemudian, Carl Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan atau peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya menyangkut tindakan yang dilakukan pemerintah, namun juga oleh kelompok maupun individu. Senada dengan definisi ini, James Anderson

Dipindai dengan CamScanner

terjadi karena agenda reformasi yang diusung yaitu penciptaan pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi, dan lainya belum menunjukkan hasil yang signifikan ditandai dengan adanya banyak tindakan yang justru kontra-produktif dan destruktif yang ditunjukkan oleh pejabat negara seperti korupsi di berbagai lini, penyalahgunaan wewenang oleh pemegang kekuasaan, dan anarkisme oleh aparat keamanan. Kasus korupsi Hambalang, korupsi simulator, korupsi wisma atlit, korupsi pengadaan Alquran adalah bukti nyata yang sangat memuakkan.

Fakta terjadinya *Political literacy* dan *political apathism* di atas tidak hanya mewabah di masyarakat umum, namun pada masyarakat akademik di perguruan tinggi pun terdapat gejala yang tidak jauh berbeda. Kenyataan di atas mendasari negara untuk mengambil langkah sebagaimana diungkapkan oleh Azyumardi Azra sebagai berikut:[3] *Pertama,* reformasi konstitusional *(constitutional reforms)* yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar dan perangkat legal sistem politik; *Kedua,* reformasi kelembagaan *(institusional reforms)* yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik dan lembaga kenegaraan seperti MPR, DPR, MA, DPA dan sebagainya; *Ketiga,* pengembangan kultur atau budaya politik *(political culture)* yang lebih demokratis.

---

pun mendefinisikan kebijakan publik sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Sementara itu keputusan publik didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang mengesahkan atau member arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan public. Lebih jelas lihat Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori & Proses,* Jakarta: PT Buku Kita, 2008, hlm. 18 & 22

[3] *Op.Cit,* hlm. 15

Dipindai dengan CamScanner

Reformasi konstitusional dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali, yaitu: 1) Amandemen yang pertama kali ini disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 atas dasar SU MPR 14-21 Oktober 1999. Amandemen yang dilakukan terdiri dari 9 pasal, yakni: Pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, pasal 21. Inti dari amandemen pertama ini adalah pergeseran kekuasaan Presiden yang dipandang terlalu kuat (*executive heavy*); 2)Amandemen yang kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan disahkan melalui sidang umum MPR 7-8 Agustus 2000. Amandemen dilakukan pada 5 Bab dan 25 pasal. Berikut ini rincian perubahan yang dilakukan pada amandemen kedua. Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, pasal 30, pasal 36B, pasal 36C. Bab IXA, Bab X, Bab XA, Bab XII, Bab XV, Ps. 36A ; Inti dari amandemen kedua ini adalah Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan; 3) Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan disahkan melalui ST MPR 1-9 November 2001. Perubahan yang terjadi dalam amandemen ketiga ini terdiri dari 3 Bab dan 22 Pasal. Berikut ini detil dari amandemen ketiga.

Pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal23C, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A, pasal24B, pasal24C. Bab VIIA, Bab VIIB, Bab VIIIA. Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah Bentuk dan Kedaulatan

Dipindai dengan CamScanner

Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman; 4) Sejarah amandemen UUD 1945 yang terakhir ini disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 melalui ST MPR 1-11 Agustus 2002. Perubahan yang terjadi pada amandemen ke-4 ini terdiri dari 2 Bab dan 13 Pasal. Pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 37. BAB XIII, Bab XIV. Inti Perubahan: DPD sebagai bagian MPR, Penggantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan UUD.

Amandemen terhadap UUD 1945, telah membawa konsekuensi berubahnya struktur ketatanegaraan di Indonesia. Akibatnya posisi, struktur dan hubungan politik-hukum antarlembaga-lembaga negara yang ada dan yang baru juga telah berubah secara signifikan. Perubahan tersebut antara lain diformulasikannya kembali hubungan-hubungan antar kekuasaan yang ada (terutama eksekutif dan legislatif), contoh, kalau sebelum direformasi presiden adalah mandataris MPR, maka setelah reformasi, presiden bukan mandataris MPR karena dipilih oleh rakyat secara langsung.

Selain berubahnya struktur ketatanegaraan, amandemen UUD 1945 juga membawa konsekuensi terbentuknya beberapa lembaga negara baru, antara lain Mahkamah Konstitusi (MK). MK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Sejarah berdirinya MK diawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2),

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001. MK Berwenang: 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. 2) Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Selain MK, juga ada Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, dan lainya. Lebih jelas lihat gambar di bawah ini.

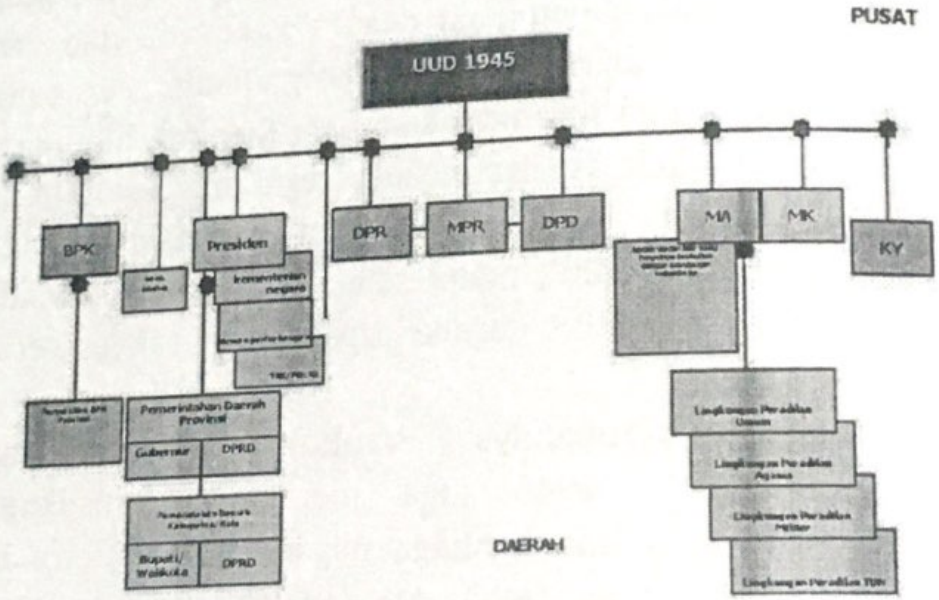

Gambar 1.1

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dipindai dengan CamScanner

Kembali lagi kepada tiga bentuk reformasi sebagaimana ditawarkan oleh Azumardi di atas, jika pada point pertama dan kedua, reformasi dilakukan pada tataran lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, maka pada point ketiga yaitu pengembangan kultur demokratis harus dilakukan dengan melibatkan semua segmen masyarakat mulai dari elit politik, masyarakat, termasuk masyarakat akademik, secara terus menerus. Salah satu cara untuk mengembangkan kultur demokratis di PT adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan *(Civic Education)*.

Melalui PKn peserta didik dapat menjadikanya sebagai wahana dan instrumen untuk melaksanakan social engineering dalam rangka membangun modal sosial yang efektif bagi tumbuh kembangnya kultur demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta terciptanya masyarakat yang dicita-citakan yaitu masyarakat madani atau masyarakat sipil yang keberadaanya sangat diperlukan dalam sistem negara yang demokratis.

Pendidikan kewarganegaraan sudah diajarkan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) sejak tahun 1969 dengan sebutan *kewargaan negara.* Kemudian pada tahun 1975 sampai 1984 mengalami perubahan dengan nama *Pendidikan Moral Pancasila* (PMP). Pada tingkat Perguruan Tinggi berganti nama dengan istilah Pendidikan Kewiraan. Pada tingkat SD dan sekolah menengah berganti nama dengan nama PPKN. Hingga pada tahun 2003, semua tingkat pendidikan menggunakan nama dan kurikulum yang baru dengan sebutan Pendidikan Kewarganegaraan hingga sampai saat ini.[4]

---

[4]Agung Born, *Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, (blogspot)* http://agungborn91.wordpress.com, diakses 2 Desember 2011

Dipindai dengan CamScanner

Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pun mengalami beberapa kali pembaharuan. Awal 1979, materi disusun oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Dirjen Dikti (Direktorat Pendidikan Tinggi) yang terdiri dari wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional, politik dan strategi pertahanan dan keamanan nasional, sistem Pertahanan Keamanan Merata (Hankamrata). Mata kuliah ini bernama Pendidikan Kewiraan. Tahun 1985, diadakan penyempurnaan oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti, terdiri atas pengantar yang bersisikan gambaran umum tentang bahan ajar PKn dan interelasinya dengan bahan ajar mata kuliah lain, sedangkan materi lainnya tetap. Tahun 1995, nama mata kuliah berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan yang bahan ajarnya disusun kembali oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti dengan materi pendahuluan, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik strategi nasional, politik dan strategi pertahanan dan keamanan nasional, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Tahun 2001, materi disusun oleh Lemhannas dengan materi pengantar, demokrasi, HAM, lingkungan hidup, bela negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional. Kemudian, Tahun 2002, Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/Kep/2002 materi berisi pengantar sebagai kaitan dengan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKP), demokrasi, HAM, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional.[5]

Tidak jauh berbeda dengan kondisi di atas, materi-materi PKN di Perguruan Tinggi Agama Islam yang bernaung di bawah Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis)

[5] Agung Born, *Ibid.*

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Agama (Kemenag) RI pun mengalami perubahan-perubahan seiring dengan kondisi perpolitikan di negara Indonesia. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan saat ini meliputi materi tentang: (1) Identitas Nasional; (2) Negara; (3) Warganegara; (4) Konstitusi; (5) Demokrasi; (6) Otonomi Daerah; (7) *Good Governance*; (8) Hak Asasi Manusia (HAM) dan (9) Masyarakat Madani.

B. Istilah & Definisi PKn

Secara etimologi, istilah *Civic Education* oleh sebagian pakar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Istilah Pendidikan Kewargaan diwakili oleh Azyumardi Azra dan Tim ICCE *(Indonesian Center for Civic Education)* UIN Jakarta sebagai Pengembang *Civic Education* di Perguruan Tinggi, sedangkan istilah Pendidikan Kewarganegaraan diwakili oleh Zamroni, Muhammad Numan Soemantri, Udin S. Winataputra dan Tim CICED *(Center Indonesian for Civic Education),* Merphin Panjaitan, Soedijarto dan pakar lainnya.[6]

Istilah Pendidikan Kewargaan pada satu sisi identik dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Namun disisi lain istilah Pendidikan Kewargaan secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warganegara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan warganegara menjadi warga dunia *(global society)*. Dengan demikian orientasi

[6] Tim ICCE, *Op.Cit.*, hlm. 6

Dipindai dengan CamScanner

Pendidikan Kewargaan secara substantif lebih luas cakupannya dari istilah Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewargaan semakin menemukan momentumnya pada dekade 1990-an dengan pemahaman yang berbeda-beda. Bagi sebagian ahli, Pendidikan Kewargaan diidentikkan dengan Pendidikan Demokrasi *(democracy education)*, Pendidikan Warganegara *(citizenship education)* dan Pendidikan HAM *(human rights education)*. Menurut Azra, Pendidikan Demokrasi (*democracy education*) secara substantif menyangkut sosialisasi, desiminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktek demokrasi melalui pendidikan. Sedangkan Pendidikan Kewargaan yang diidentikkan dengan pendidikan HAM mengandung pengertian sebagai aktivitas mentransformasikan nilai-nilai HAM agar tumbuh kesadaran akan penghormatan, perlindungan dan penjaminan HAM sebagai sesuatu yang kodrati dan dimiliki setiap manusia. Agar pendidikan HAM mencapai tujuan, diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut: *pertama*, lingkungan kelas haruslah demokratis; *kedua*, pasal-pasal mengenai HAM tidak dapat diajarkan secara verbalistik, melainkan harus melalui situasi dan pengalaman yang dikenal oleh peserta didik; *ketiga*, sistem pembelajaran yang dikembangkan adalah sistem interaktif.[7]

Masih menurut Azra, Pendidikan Kewargaan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, hak dan kewajiban warganegara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan

---

[7] Tim ICCE, *Ibid.*, hlm. 6

Dipindai dengan CamScanner

keterlibatan warganegara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, warisan politik, administrasi publik dan sistem hukum, pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif, refleksi kritis, penyelidikan dan kerjasama, keadilan sosial, pengertian antarbudaya dan kelestarian lingkungan hidup dan hak asasi manusia.[8]

Sementara itu Zamroni berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kepada generasi baru kesadaran bahwa: demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat; demokrasi adalah suatu *learning proses* yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain; kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa.[9]

Senada dengan Zamroni, *pertama*, Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi mengatakan bahwa *Civic Education* yang mempunyai padanan kata *Civics, Citizenship*, dan *Citizenship Education* mengarah pada pentingnya pendidikan demokrasi

---

[8] Tim ICCE, *ibid.*, hlm. 7
[9] Tim ICCE, *ibid.*, hlm. 7

Dipindai dengan CamScanner

atau pendidikan politik bagi bagi rakyat atau masyarakat.[10] *Kedua, Soedijarto, Pendidikan Kewarganegaraan* didefinisikan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa; dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis; *ketiga*, Merphin Panjaitan mendefinisikan *Pendidikan Kewarganegaraan* adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogal.[11]

Berbagai definisi yang diberikan para ahli di atas, maka *Civic Education* adalah program pendidikan yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungannya dengan negara, demokrasi, HAM dan masyarakat madani *(civil society)* yang dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokratis dan humanis.

C. Kompetensi Dasar & Tujuan PKn

Kompetensi merupakan kemampuan dan kecakapan yang terukur setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran secara keseluruhan, yang meliputi kemampuan akademik, sikap, dan ketrampilan. Adapun kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal yang diharapkan setelah mempelajari pendidikan kewargaan adalah: *pertama*, kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan kewargaan (*Civic Knowledge*) yang

---

[10] Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 75

[11] Tim ICCE, *Op. Cit.*, hlm. 9

Dipindai dengan CamScanner

terkait dengan materi-materi inti Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*) antara lain demokrasi, HAM, dan masyarakat madani *(Civil Society); kedua*, kecakapan dan kemampuan sikap kewargaan (*Civic Dispositions*) antara lain pengakuan kesetaraan, toleransi, kebersamaan, pengakuan keragaman, kepekaan terhadap masalah warganegara antara lain masalah demokrasi dan hak asasi manusia; dan *ketiga,* kecakapan dan kemampuan mengartikulasikan keterampilan kewargaan (*Civic Skills*) seperti kemampuan berpartisiasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, dan kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara serta pemerintahan.[12]

Sedangkan tujuan PKn dengan mengacu pada rumusan Tim ICCE, Pendidikan Kewargaan bertujuan (a) untuk membentuk kecakaan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, regional dan global; (b) menjadikan warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera dan demokratis; (c) menghasilkan mahasiswa yang berpikir kritis dan bertindak demokratis yang dalam bahasa Lord Henry Peter Broughton akan menjadi wargabangsa yang mudah dipimpin tetapi sulit untuk dikendalikan, mudah diperintah tetapi sulit untuk diperbudak; (d) mengembangkan pada diri mahasiswa kultur demokrasi yaitu kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, kemampuan menahan diri, kemampuan melakukan dialog, negosiasi, kemampuan mengambil keputusan serta kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan politik kemasyarakatan; (e) mampu

[12] Tim ICCE, *ibid.*, hlm. 9 - 10

Dipindai dengan CamScanner

membentuk mahasiswa menjadi *good and responsible citizen* (warganegara yang baik dan bertanggung jawab) melalui penanaman moral dan keterampilan *(social skills)* sehingga kelak mereka mampu memahami dan memecahkan persoalan-persoalan aktual kewarganegaraan seperti toleransi, perbedaan pendapat, bersikap empati, menghargai pluralitas, kesadaran hukum dan tertib sosial, menjunjung tinggi HAM, mengembangkan demokratisasi dalam berbagai lapangan kehidupan dan menghargai kearifan lokal *(local wisdom)*.

D. Orientasi PKn

Orientasi pendidikan suatu bangsa akan menunjukkan bagaimana proses pendidikan berlangsung, dan pada tahap berikutnya akan dapat meramalkan kualitas dan profil lulusan sebagai hasil dari proses pendidikan. Orientasi pendidikan terkait dengan empat hal yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan yaitu peserta didik (mahasiswa), dosen, materi dan manajemen pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan (praksis) paling tidak terdapat dua kutub orientasi pendidikan yang paradoksal yaitu orientasi feodalistik dan orientasi humanistik.

Orientasi feodalistik mempunyai asumsi bahwa lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi) merupakan tempat melatih dan mempersiapkan peserta untuk masa datang. Oleh karena itu peserta didik (siswa dan mahasiswa) ditempatkan sebagai obyek dalam pembelajaran semata; dosen sebagai satu-satunya sumber ilmu, kebenaran dan informasi, berprilaku otoriter dan birokratis; materi pembelajaran disusun secara rigid sehingga memasung kreativitas peserta didik (mahasiswa) dan dosen; sedangkan

Dipindai dengan CamScanner

manajemen pendidikan termasuk manajemen pembelajaran dalam konteks spesifik bersifat sentralistik, birokratis dan monolitik dalam penerapan strategi pembelajaran, iklim pembelajaran yang dogmatis, indoktrinatif dan otoriter. Akibat dari orientasi tersebut lulusan pendidikan menjadi manusia robot dan tidak kreatif dan tidak demokratis atau otoriter. Orientasi feodalistik dalam praksis pendidikan telah berlangsung cukup lama dalam dunia pendidikan nasional mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

Orientasi humanistik mendasarkan pada asumsi bahwa peserta didik adalah makhluk manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Karena itu dalam pandangan ini peserta didik (mahasiswa) ditempatkan sebagai subyek sekaligus obyek pembelajaran; dosen diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog peserta didik; materi pembelajaran disusun berdasarkan kebutuhan dasar (*basic needs*) peserta didik, bersifat fleksibel, dinamis dan fenomenologis sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan memiliki relevansi dengan tuntutan dan perubahan sosial. Model materi pembelajaran tersebut mendorong terciptanya kelas pembelajaran Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*) yang hidup *(life classroom)* dan meminjam istilah Ace Suryadi sebagai *global classroom;* manajemen pendidikan dan pembelajaran menekankan pada dimensi desentralistik, tidak birokratis, mengakui pluralitas dengan strategi pembelajaran yang bervariasi dan demokratis. Untuk itu kelas pembelajaran Pendidikan Kewargaan diperlakukan meminjam istilah Udin S. Winataputra sebagai laboratorium demokrasi di mana semangat kewarganegaraan yang memancar dari cita-cita dan nilai demokrasi diterapkan secara interaktif.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam situasi itu dosen dan mahasiswa secara bersama-sama mengembangkan dan memelihara iklim demokrasi. Akibat dari orientasi humanistik tersebut peserta didik (mahasiswa) dimungkinkan menjadi lulusan pendidikan yang memiliki kreativitas tinggi, kemandirian dan sikap toleransi yang tinggi, karena dalam proses pembelajaran telah tumbuh iklim dan kultur yang demokratis.

Karenanya orientasi Pendidikan Kewargaan *(Civic Education)* mulai dari pendidikan dasar sampai Pendidikan Tinggi harus lebih menerapkan orientasi humanistik. Dengan orientasi humanistik pengalaman belajar *(learning experience)* yang diterima peserta didik menjadi bermakna. Dengan orientasi tersebut pembelajaran yang dialami peserta didik menjadikan pengetahuan yang diperolehnya *(learning to know)* tersimpan dalam memori yang sejati dan menjadi pendorong untuk selalu belajar tentang masalah demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani (*civil society*).

Selanjutnya pengalaman pembelajaran yang berorientasi humanistik membuat peserta didik menemukan jati dirinya *(learning to be)* sebagai manusia yang sadar akan tanggung jawab individu dan sosial. Pengetahuan dan kesadaran diri yang tercipta dari hasil pembelajaran tersebut mendorong kepada peserta untuk melakukan sesuatu *(learning to do)* yang didasari oleh pengetahuan yang dimilikinya. Apa yang dilakukan oleh peserta didik dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama *(learning to live together).* Kehidupan bersama tersebut dibangun atas dasar kesadaran akan realitas keragaman dan saling memerlukan sebagai warga negara.

Dipindai dengan CamScanner

Learning to live together menjadi penting khususnya menghadapi dunia yang penuh konflik dan banyaknya pelanggaran HAM. Kehidupan yang damai ini bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi masyarakat, orang tua, siswa/mahasiswa, guru/dosen dan semua pihak. Dalam lingkup Asia-Pasifik yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa, tatanan geografis, sosio-politik, agama, dan tingkat ekonomi kaum muda perlu diajarkan kepada keindahan dari keragaman kultural ini. *Learning to live together* dalam globalisasi yang kooperatif tetapi sekaligus juga pelestarian nilai-nilai budaya dan kemanusian sedemikian sehingga ada usaha bersama untuk saling mengasihi dalam kehidupan bersama. Dengan demikian pembelajaran Pendidikan Kewargaan baik sebagai pendidikan demokrasi maupun sebagai pendidikan HAM mensyaratkan situasi pembelajaran yang interaktif, empiris, kontekstual, kasuistis dan demokratis.

E. Ruang Lingkup Materi PKn

Sebagaimana dijelaskan di atas, ruang lingkup Pendidikan Kewargaan meliputi materi: (1) Identitas Nasional; (2) Negara; (3) Warganegara; (4) Konstitusi; (5) Demokrasi; (6) Otonomi Daerah; (7) *Good Governance*; (8) Hak Asasi Manusia (HAM) dan (9) Masyarakat Madani.

Pertama, pembahasan mengenai identitas nasional terdiri dari pengertian tentang identitas nasional, unsur-unsur pembentuk identitas nasional, perlunya integrasi nasional, dan arti penting nasionalisme di Indonesia, serta rekonstruksi nasionalisme Indonesia.

Kedua, negara. Membincang tentang negara adalah hal yang sangat penting mengingat setiap warga negara pasti

Dipindai dengan CamScanner

pernah berurusan dengan negara, mulai dari urusan kelahiran, kematian, pembuatan KTP, Kartu Keluarga, pernikahan, dan lainya. Maka, pada bab ini akan dibahas mengenai konsep dasar negara, sifat negara, unsur-unsur pembentuk negara, tujuan dan fungsi negara, teori terbentuknya negara, serta relasi agama dan negara pada umumnya dan di Indonesia.

Ketiga, warganegara. Secara teoritis, upaya mendefinisikan warga negara dan siapa yang menjadi warga untuk suatu negara itu tidak mudah. Hal ini adalah suatu kenyataan karena definisi warga negara untuk suatu negara berbeda dengan definisi warga negara untuk negara lainnya. Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Barker menyatakan: "different constitutions require different types of good citizen".[13] Pernyataan ini mengindikasikan bahwa untuk mengetahui pengertian warga negara suatu negara tergantung pada konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Bab ini akan menjelaskan tentang: konsep warga Negara dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia; asas-asas kewarganegaraan; problem status kewarganegaraan; hilangnya status kewarganegaraan; dan hubungan warga negara dan negara.

Keempat, Konstitusi. Bab ini dibahas mengenai konsep dasar konstitusi, pentingnya konstitusi dalam suatu negara, lahirnya konstitusi di Indonesia, perubahan konstitusi dan perubahan konstitusi di Indonesia.

Kelima, demokrasi. Berbicara tentang demokrasi, sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi kita. Setiap hari,

---

[13] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Depag RI, *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, 2009, hlm. 4

Dipindai dengan CamScanner

bahkan setiap saat kata demokrasi mengisi perbincangan berbagai lapisan masyarakat dalam berbagai kesempatan mulai dari obrolan warung kopi sampai dalam forum ilmiah seperti seminar, lokakarya, simposium, diskusi publik dan sebagainya. Maraknya perbincangan "demokrasi" seringkali dikaitkan dengan berbagai kata yang mengikuti, karena itu lahir tema-tema seperti : Islam dan demkorasi, politik dan demokrasi, ekonomi dan demokrasi, pendidikan dan demokrasi, hukum dan demokrasi, dan tema lainnya. Hal itu merupakan indikator besarnya perhatian berbagai lapisan masyarakat -mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat kelas elit seperti kalangan elit politik, birokrat pemerintahan, tokoh masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, cendekiwan, mahasiswa dan kaum profesional lainnya tentang wacana dan isu demokrasi. Bab ini membincang tentang makna dan hakekat demokrasi, unsur penegak demokrasi, sejarah lahirnya demokrasi, perkembangan demokrasi di dunia dan di Indonesia, dan model-model demokrasi.

Keenam, otonomi daerah. Bab ini disajikan beberapa konsep yang berhubungan dengan otonomi daerah dan desentralisasi serta pemaparan aspek teoritis dan implementasinya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia.

Ketujuh, Good Governance. Bab ini mengantarkan kepada kita pemahaman mengenai konsep *good governance*, urgensi *good governance*, dan aspek-aspek fundamental dalam *good governance*.

Delapan, Hak Asasi Manusia (HAM). Bab ini dibahas tentang pengertian dan hakikat HAM, sejarah lahir dan perkembangan HAM, bentuk-bentuk HAM, nilai-nilai yang

Dipindai dengan CamScanner

terkandung dalam HAM, HAM dalam tinjauan agama-agama, pengaturan perundang-undangan dalam bidang HAM, pelanggaran dan pengadilan HAM, tanggung jawab pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM dan lembaga Komisi Nasional HAM.

Sembilan, Civil Society. Bab ini diuraikan tentang definisi dan arti *civil society*, istilah *civil society* di Indonesia, dan perkembangan *civil society* di Indonesia. ****

Dipindai dengan CamScanner

BAB 2

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI: Studi Kasus di STAIN Kudus

Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) merupakan salah satu materi muatan kurikulum yang wajib diberikan pada semua program studi.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus yang merupakan perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia pun menjadikan PKn sebagai mata kuliah wajib di semua program studi yang ada. Bab ini akan dipaparkan tentang pelaksanaan pembelajaran PKN di STAIN Kudus.

A. Profil STAIN Kudus[1]

Eksistensi STAIN Kudus tidak dapat terlepas dari sejarah berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di

[1] www.stainkudus.ac.id diakses tanggal 24 September 2012

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia yaitu Institut Agama Islam Negeri. Di samping itu, keberadaan IAIN sendiri tidak terlepas dari pasang surutnya perjuangan Islam di Indonesia terutama dalam bidang dakwah Islamiyah.

Sejarah telah mencatat bahwa kerajaan Islam yang pertama dipulau Jawa berada di Demak, yang dikenal dengan Kerajaan Islam Demak. Bersamaan dengan kejayaan Kerajaan Islam tersebut hidup sejumlah Wali yang cukup tersohor dan sangat berjasa pada dalam penyiaran dan pengembangan agama Islam di nusantara, khususnya di Pulau Jawa, lebih khusus lagi di kawasan timur pantai utara JawaTengah. Di antara sejumlah Wali tersebut ada 9 orang yang terkenal dan dua di antara mereka ada di Kudus, yaitu Ja'far Shodiq (Sunan Kudus) dan Raden Umar Said (Sunan Muria). Dengan demikian maka Jawa Tengah bagian utara dulu pernah menjadi pusat pengkajian dan penyebaran agama Islam.

Pada waktu pemerintahan Republik Indonesia berpusat di Yogyakarta (1949), Pemerintah mendirikan perguruan Tinggi yang diberi nama Universitas Gajah Mada yang semula adalah perguruan tinggi swasta, yang diperuntukkkan untuk golongan nasional. Sedangkan untuk golongan Islam didirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang diambilkan dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia yang nota bene adalah perguruan tinggi swata.

Dalam proses selanjutnya, pada tahun 1960, PTAIN di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta digabung menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dengan nama *al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah*. IAIN yang semula hanya ada di Yogyakarta, kemudian

Dipindai dengan CamScanner

berkembang menjadi 14 IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1963 Yayasan Kesejahteraan Daerah (YKD) Kudus mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Ekonomi yang sekarang menjadi Universitas Muria Kudus, dan Perguruan Tinggi Agama Islam yang kemudian menjadi Fakultas Tarbiyah yang secara operasional menginduk kepada IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian pada tahun 1969 berdiri juga Fakultas Ushuluddin. Dalam perkembangannya, pada tanggal 6 April 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1970 Fakultas Ushuluddin dinegerikan. Bersamaan dengan itu pula Fakultas Tarbiyah ditarik ke IAIN Walisongo Semarang dan Fakutas Ushuluddin tetap di Kudus sebagai Fakultas Daerah dari IAIN Walisongo Semarang. Kemudian para dermawan, seperti BAPENI, Pemerintah Daerah, tokoh agama dan masyarakat serta industri rokok memberikan tanah wakaf untuk fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo yang berada di Kudus.

Pada bulan Maret 1997 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Dengan berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, maka Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang yang berada di Kudus beralih status dan berdiri sendiri menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus atau yang sekarang lebih dikenal sebagai STAIN Kudus.

Setelah berdiri sendiri menjadi STAIN Kudus, Fakultas Ushuluddin menjadi Jurusan Ushuluddin dan kemudian STAIN Kudus berhasil mengembangkan beberapa jurusan, yaitu: Ushuluddin, Tarbiyah, Syari'ah dan Dakwah.

Dipindai dengan CamScanner

Masing masing jurusan memiliki program studi sebagai berikut:

1. Jurusan tarbiyah memiliki 2 program studi yaitu (1) prodi Pendidikan Agama Islam (PAI); (2) Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA);
2. Juruan Syariah memiliki 3 program studi (1) Prodi Ekonomi Islam; (2) Prodi al akhwal sakhsyiyah (AS)/ Hukum Islam; (3) Manajemen Biasnis Syariah (MBS);
3. Jurusan Dakwah memiliki 1 prodi yaitu Prodi Bimbingan penyuluhan Islam (BPI);
4. Jurusan Ushuluddin memiliki 1 Prodi yaitu Prodi Tafsir Hadits (TH).

Pola Ilmiah Pokok (PIP) STAIN Kudus adalah Islam trasformatif yaitu pola atau cara fikir dalam memahami agama Islam yang ditandai dengan tiga pergeseran yaitu: *Pertama* pergeseran dari pikir ke aksi; *kedua* pergeseran dari teks ke konteks; dan *ketiga* pergeseran dari individu ke sosial. Dengan PIP ini, diharapkan lulusan STAIN Kudus dan seluruh civitas akademika memiliki kualitas memahami agama dengan tiga pergeseran tersebut.

Pola Ilmiah Pokok (PIP) STAIN Kudus diharapkan mampu melahirkan profil lulusan atau alumni yang sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Alumni STAIN Kudus tidak cukup hanya memiliki pengetahuan yang sifatnya kognitif melainkan harus mampu memiliki perilaku yang tepat baik secara individual maupun sosial.

a. Pergeseran dari pikir ke aksi adalah seluruh lulusan dan civitas akademika STAIN Kudus tidak cukup hanya memiliki pikiran atau konsep saja melainkan harus

Dipindai dengan CamScanner

memiliki aksi atau tindakan yang nyata dan bermanfaat untuk masyarakat.

b. Pergeseran dari teks ke konteks adalah seluruh lulusan dan civitas akademika STAIN kudus tidak cukup hanya memiliki pemahaman yang bersifat tekstual melainkan harus memiliki pemahaman yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
c. Pergeseran dari individu ke social adalah bahwa seluruh lulusan dan civitas akademika STAIN Kudus tidak cukup hanya shaleh secara individu melainkan harus sholeh secara sosial, artinya kebaikan yang dimiliki tidak hanya di dalam dirinya sendiri malainkan juga harus berimplikasi kepada elemen lain yang bersifat organaisasi atau lembaga.

Adapun visi STAIN Kudus adalah "Membangun dan memberdayakan ilmu-ilmu agama Islam dengan menginternalisasikan ketangguhan dan keanggunan karakter moral, kesalehan nurani/spiritual dan ketajaman nalar/emosional untuk mewujudkan masyarakat madani". Dan, misi STAIN Kudus adalah: "Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Islami dan berkualitas guna mewujudkan insan akademik yang cakap dan saleh, berakhlak mulia, dengan menumbuhkembangkan etos ilmu, etos kerja dan etos pengabdian yang tinggi, serta berpartisipasi aktif dalam memberdayakan segenap potensi masyarakat".

Di STAIN Kudus berdasar data di kepegawaian, pada Tahun 2012 ini memiliki 54 pegawai. Dengan komposisi laki-laki 32 dan perempuan 22. Dari jumlah pegawai tersebut, perempuan dan laki-laki yang menduduki jabatan tinggi

Dipindai dengan CamScanner

berbanding 2:5. Selain PNS, di STAIN Kudus mengangkat pegawai honorer berjumlah 9 orang dan pegawai kontrak berjumlah 27 orang terdiri 19 laki-laki dan 8 perempuan.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi pegawai, jumlah dosen perempuan di STAIN Kudus yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 32 orang dari 108 dosen. Selain dosen tetap, STAIN Kudus juga mengangkat dosen tidak tetap, jumlahnya saat ini 23 orang.

Data di atas menunjukkan bahwa perempuan akademik pun mengalami persoalan kesenjangan dan ketimpangan gender. Ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi di atas terjadi, antara lain yang ditemukan oleh Siti Malaiha Dewi, dkk. dalam penelitian yang berjudul: "Problematika Dosen Perempuan dalam Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Kudus, Tahun 2010", bahwa:

1. Kendala internal atau yang berasal dari diri dosen perempuan itu sendiri, antara lain:
   - Sifat keibuan (*motherhood*) dari dosen perempuan yang tidak bisa meninggalkan *nature* feminin-nya seperti mengasuh anak, dan mengatur urusan rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan dosen perempuan sering mengalami *role conflict* di antara tugas mereka sebagai dosen dan ibu rumah tangga; Hal ini disebabkan karena mereka masih memiliki pemahaman bahwa peran domestik seperti mengurus rumah, merawat anak, dan suami adalah tugas utama yang tidak mungkin ditinggalkan ataupun dibagikan. Akhirnya, dosen perempuan harus berjuang untuk menyeimbangkan kedua peran tersebut, sehingga banyak juga dosen perempuan

Dipindai dengan CamScanner

yang menjalankan tugasnya dengan mengajak anak-anak mereka. "Saya selalu mengajak anak saya pada saat kegiatan – kegiatan di luar jam ngajar, contohnya pada saat kegiatan pengabdian yang merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi, saya pasti mengajak mereka", demikian ungkapan salah satu narasumber dalam penelitian tersebut.

- *Need of Achievement* dosen perempuan yang rendah sehingga banyak yang melaksanakan pekerjaan hanya agar membuat gugur tugas saja. Jarang sekali dosen perempuan yang memiliki keinginan untuk mengikuti berbagai kompetisi yang diselenggarakan di luar kampus.

2. *Kedua*, faktor yang berasal dari luar diri dosen perempuan atau disebut faktor eksternal, antara lain: kebijakan lembaga yang belum mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan.

Penelitian ini juga memberikan rekomendasi atas kedua persoalan di atas, sebagai berikut:

1. Terkait dengan persoalan internal dosen perempuan, hendaknya dosen perempuan memiliki kerelaan untuk berbagi peran dengan pasanganya dalam hal pengasuhan anak, dan urusan lainya di rumah tangga, sehingga sedikit demi sedikit sifat *motherhood* akan berkurang. Kemudian, lingkungan sekitar (keluarga dan lingkungan kerja) hendaknya mendorong dosen perempuan untuk mengeluarkan segala potensi yang dimilikinya untuk berprestasi dan tidak menjadikan 'keperempuananya' menjadi hambatan untuk berprestasi; dan
2. Rekomendasi untuk hambatan yang bersifat eksternal adalah hendaknya pimpinan atau pengambil kebijakan

Dipindai dengan CamScanner

bersedia untuk mau mendengar suara dan kebutuhan perempuan, serta problem yang mereka hadapi. Kemudian dibutuhkan juga komitmen pimpinan untuk memberikan *affirmative action* bagi perempuan dalam pembuatan kebijakanya. Contoh: jadwal mengajar maupun kegiatan lainya dibuat dengan mempertimbangkan *nature* feminin perempuan yaitu selain jam pertama. (lebih lengkap kajian tentang ketimpangan gender di STAIN Kudus, akan diuraikan pada bab berikutnya).

B. Hakikat Belajar dan Pembelajaran

B.1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran

Bagi para peserta didik, kata "belajar" merupakan kata yang tidak asing. Bahkan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. Kegiatan belajar mereka lakukan setiap waktu sesuai dengan keinginan. Namun dari semua itu tidak setiap orang mengetahui apa itu belajar. Dan sebenarnya dari kata "belajar" itu ada pengertian yang tersimpan di dalamnya. Pengertian dari kata "belajar" itulah yang perlu diketahui dan dihayati, sehingga tidak melahirkan pemahaman yang keliru mengenai masalah belajar.

Beberapa ahli psikologi mengemukakan rumusan pengertian "belajar" yang berlainan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Adapun belajar mempunyai definisi diantaranya meliputi :

a. *James O Whittaker*, merumuskan bahwa belajar sebagai proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman

Dipindai dengan CamScanner

b. *Cornbach*, berpendapat bahwa belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman
c. *Howard L. Kingskey*, mengatakan bahwa belajar adalah proses dimana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah menjadi praktek atau latihan
d. *Dr. Slameto*, juga merumuskan pengertian tentang belajar. menurutnya belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya

Dari pendapat beberapa para ahli tentang pengertian belajar yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur yaitu jiwa dan raga. Perubahan proses yang didapat bukan perubahan fisik, tetapi perubahan jiwa dengan sebab masuknya kesan-kesan yang baru. Dengan demikian, maka perubahan sebagai hasil dari belajar proses belajar adalah perubahan jiwa yang mempengaruhi tingkah laku seseorang.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor.[2]

Sedangkan pembelajaran sebenarnya sama dengan belajar. Biasanya pembelajaran terkait pada lembaga pendidikan yang berlangsung di dalam ruang kelas.

---

[2] Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 13

Dipindai dengan CamScanner

Pembelajaran lebih menarik perhatian pada siswa, memberikan bimbingan belajar, dan merangsang siswa agar mengingat kembali hasil belajar. Yang melakukan pembelajaran ini sebenarnya dilakukan oleh guru yang bersangkutan, dan guru ditunjuk sebagai fasilitator untuk mengadakan pembelajaran. "belajar dan pembelajaran" memang dapat ditelisik secara luas. Bukan hanya definisi belajar dan pembelajaran saja, namun, dari definisi itu lahirlah teori belajar dan pembelajaran yang dikemukakan oleh para peneliti terkemuka.[3]

Pembelajaran berasal dari kata ajar yang secara bahasa berarti apa yang dikatakan kepada orang lain supaya diketahui.[4] Sedangkan menurut istilah adalah proses penyampaian bahan pelajaran dari seseorang kepada orang lain, dengan tujuan agar orang lain menerima, menguasai, dan mengembangkan.[5]

Senada dengan definisi di atas, menurut KBBI, pembelajaran yang diidentikkan dengan kata "mengajar" berasal dari kata dasar "ajar" yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut) ditambah dengan awalan "pe" dan akhiran "an menjadi "pembelajaran", yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan

---

[3] Dimyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal 7

[4] WJS Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1984, hlm. 22

[5] Kelvin Seiver, *Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pembelajaran*, IRCIS, 2008, hlm. 117

Dipindai dengan CamScanner

pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan , penguasaan kemahiran dan tabiat , serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda.

Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya

Dipindai dengan CamScanner

peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik.

Pembelajaran adalah Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU No. 20/2003, Bab I Pasal Ayat 20).

Istilah "pembelajaran" sama dengan "instruction" atau "pengajaran". Pengajaran mempunyai arti cara mengajar atau mengajarkan.[6] Dengan demikian pengajaran diartikan sama dengan perbuatan belajar (oleh siswa) dan Mengajar (oleh guru). Kegiatan belajar mengajar adalah satu kesatuan dari dua kegiatan yang searah. Kegiatan belajar adalah kegiatan primer, sedangkan mengajar adalah kegiatan sekunder yang dimaksudkan agar terjadi kegiatan secara optimal.

Kesimpulan dari definisi-definisi di atas pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama dan karena adanya usaha.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa komponen :

---

[6] Perwadinata, *ibid*, hlm.22

Dipindai dengan CamScanner

1) Siswa, Seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
2) Guru, Seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan peran lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif.
3) Tujuan, Pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif, psikomotorik, afektif) yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.
4) Materi Pelajaran, Segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
5) Metode, Cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapat informasi yang dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan.
6) Media, Bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk menyajikan informasi kepada siswa.
7) Evaluasi, Cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya.

B.2. Teori-Teori Belajar

Dari dulu hingga sekarang para ahli psikologi dan pendidikan tidak bosan-bosannya membicarakan masalah belajar. Penelitian demi penelitian sudah pula dilakukan. Berbagai teori belajar telah tercipta sebagai hasil kerja keras dari penelitian. Untuk mengetahui teori-teori belajar yang telah dikemukakan oleh para ahli, berikut penjelasannya[7] :

a. Teori Belajar menurut ilmu jiwa Gestalt

---

[7] Syaiful Bahri Djamarah, *Op. Cit*, hal 17- 23

Dipindai dengan CamScanner

Gestalt adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh *Koffa* dan *Kohler* dari Jerman. Teori ini berpandangan bahwa keseluruhan lebih penting dari bagian-bagian. Sebab keberadaan bagian itu di dahului oleh keseluruhan. Dalam belajar, menurut teori *Gestalt* yang terpenting adalah penyesuaian. Yang pertama yaitu mendapatkan respons atau tanggapan yang tepat. Sehingga dapat dikemukakan belajar adalah suatu kegiatan unuk memperoleh kemampuan dasar yang berulang-ulang, yang di dapat untuk menghadapi situasi baru yang timbul dari beberapa pengalaman.

b. Teori belajar dari R. Gagne

Dalam masalah belajar, *Gagne* memberikan dua definisi. Yaitu :

- Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku.
- Belajar adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi.

Gagne mengatakan bahwa segala sesuatu yang dipelajari oleh manusia dapat dibagi menjadi lima kategori yang disebut *the domains of learning*, yaitu sebgai berikut :

NO	DOMAIN	KETERANGAN
1.	Keterampilan mottorik	Melatih keterampilan dari gerakan
2.	Informasi verbal	Informasi yang perlu pengeratahuan (keteramplan membaca dan menulis)
3.	Kemampuan	Kemampuan menggunakan

Dipindai dengan CamScanner

	intelektual	simbol-simbol dalam kemampuan belajar
4.	Strategi kognitif	Keterampilan mengingat dan berpikir
5.	Sikap	Kemampuan untuk berhubungan dengan yang lain

B.3. Tujuan Belajar dan Pembelajaran

Belajar merupakan hal yang kompleks. Kompleksitas belajar dapat dipandang dari dua subyek yaitu dari siswa dan guru. Dari segi siswa, belajar dialami sebagai suatu proses. Siswa mengalami proses mental dan mengalami bahan belajar. Bahan belajar tersebut berupa keadaan alam dan makhluk yang ada di bumi yang telah terhimpun dalam buku-buku pembelajaran.

Dari segi guru, proses belajar tersebut tampak sebagai perlaku belajar tentang sesuatu hal. Guru dapat memahami siswa proses belajar siswa dari perilaku yang tampak pada siswa dari mempelajari bahan belajar. apakah siswa memahami apa yang diajarkan guru atau tidak. Sehingga perilaku belajar tersebut digunakan sebagai respons siswa terhadap tindak mengajar atau tindak pembelajaran dari guru.

Setelah diketahui kompleksitas belajar, maka dapat diketahui tujuan pembelajaran yang dapat dipaparkan sebagai berikut :

a. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah untuk menyusun acara pembelajaran, dan juga untuk mendorong siswa menuju kemandirian belajar.
b. Agar siswa memiliki pengalaman dan kemampuan awal dalam proses pembelajaran

Dipindai dengan CamScanner

c. Dari tujuan instruksional yang dirumuskan oleh guru bahwa tujuan pembelajaran merupakan sarana belajar bagi siswa
d. Tindak pembelajaran di kelas harus dilaksanakan oleh guru untuk mewujudkan bahan belajar dari berbagai bidang studi
e. Tujuan pembelajaran juga penting untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor anak didik
f. Perilaku siswa merupakan hasil proses belajar. Perilaku tersebut hanya dapat berubah hanya pada perilaku yang dikehendaki. Sehingga pembelajaran bertujuan untuk menguatkan perilaku yang dikehendaki dilakukan dengan pengulangan seperti latihan, *drill*, atau aplikasi
g. Suatu pembelajaran dapat mencapai hasil belajar. Dan melalui dilaksanakannya pembelajaran karena untuk mencapai suatu puncak dari prses pembelajaran.puncak pembelajaran adalah dengan dilakukannya tes belajar di sekolah
h. Pembelajaran ditujukan siswa untuk dapat menyusun program pembelajaran setelah siswa mendapat hasil belajar. Sehingga program belajar mandiri dapat dikuasai anak[8].

B.4. Konsep Belajar Sambil Bermain

Selama pertumbuhannya, minat dan permainan anak selalu terkait dengan perkembangan kemampuannya. Oleh karena itu berbagai permainan sebenarnya bisa dirancang secara sengaja dengan maksud agar anak meningkatkan beberapa kemampuan tertentu berdasarkan pengalaman

[8] Dimyati dan Mudjiono, *Op. Cit*, hal 19-20

Dipindai dengan CamScanner

belajarnya. Anak yang menyukai permainan adalah anak yang usianya 4-6 tahun. Karena bermain melatih kecerdasannya dari afektif, kognitif dan psikomotornya.[9]

Permainan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya, dari yang tidak ia kenali sampai pada yang ia ketahui, dan dari yang tidak dapat diperbuatnya sampai mampu melakukannya. Berbagai keterampilan, bukan hanya keterampilan fisik, tetapi juga keterampilan mental menunjukkan bahwa perolehannya menjadi dasar untuk membangun pengetahuan yang lebih luas lagi. Jadi bukanlah yang sesaat harus dimilikinya.

Kebutuhan mainan harus dipenuhi pada anak. Agar tumbuh dengan memiliki keterampilan mental lebih tinggi, dan dapat mengembangkan potensinya untuk menjadi manusia yang bermartabat, dan mandiri. Lebih dari itu, ia terlatih untuk terus-menerus meningkatkan diri mencapai tujuan.

B.5. Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran dapat diketahui dari mata pelajaran anak-anak yang disukai atau yang tidak disukai anak. Hasil pembelajaran dikatakan berhasil manakala anak tidak kesulitan memahami pelajaran yang diberikan guru dan menyukai pelajaran dari guru yang mengajar. Dan kurang berhasilnya suatu pembelajaran sebenarnya subyektif, yang kemungkinan anak kurang motivasi dalam belajar. Mereka memiliki kesulitan belajar dan mempertahankan usaha mereka untuk belajar serta hasrat mereka untuk memahami sebuah mata pelajaran berada dalam suatu keadaan yang menurun. Maka dari itu peran

[9] Conny Semiawan, *Op. Cit*, hal 21-23

Dipindai dengan CamScanner

orang tua sangat memdukung untuk keberhasilan belajar anak. Bagi orang tua dapat membantu anaknya dalam mengatasi hasil belajar anak agar anak bisa belajar lebih giat. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah :

1. Menilai situasi dengan serius
   Sebagai contoh seorang anak yang merasa frustasi dan mengeluh senantiasa mengeluarkan isi hatiya pada orang tuanya, dikarenakan nilai ujiannya rendah. Dengan mendengarkan keluhan anak, orang tua dengan sabar membimbing anak serta mencari solusi yang tepat untuk keluhan anak.
2. Menghibur
   Selain mencari solusi bagi anak, orang tua tidak harus menyuruhnya belajar terus-menerus melainkan anak diberi hiburan yang positif agar anak termotivasi untuk belajar.
3. Menekankan sisi positif dari situasinya
   Orang tua dapat membantu anaknya menumbuhka hasil belajar yang baik untuk membantu anak-anak untuk menemukan apa yang bisa anak pelajari dari pengalamannya, sehingga orang tua dapat memberikan informasi yang lebih dan memperlihatkan kepada anak bahwa kita butuh belajar lagi dari kesalahan-kesalahan yang lalu.
4. Memutuskan apakah masalahnya.
   Masalah yang dihadapi anak adalah masalah evaluasi. Evaluasi harus dilaksanakan secara matang dan strategis. Apakah strategi belajar yang digunakan ? dan seberapa banyak perbedaan yang akan dibuat dengan strategi yang lebih baik ?. Hal ini harus dibicarakan secara matang karena untuk memecahkan masalah

Dipindai dengan CamScanner

apabila evaluasi ini gagal maka masalah yang akan dibahas "adakah kemungkinan untuk ujian kembali ? ". Inilah poin yang melibatkan guru dalam proses ini.

5. Mempertimbangkan dan memilih solusi
   Solusi dari permasalahan tentang hasil belajar anak yaitu mencetuskan ide-ide yang baik untuk keberhasilan belajar. Ide-ide yang masuk mengenai strategi pembelajaran dievaluasi agar efektif untuk peserta didik baik masalah yang rumit ataupun masalah yang mudah.
6. Mengevaluasi Hasilnya
   Setelah semua disempurnakan tinggallah anak yang harus berusaha keras dan yakin untuk mengikuti rencana-rencana yang telah diajukan. Sehingga hasil belajar dapat diketahui

Dari sederet tentang hal-hal yang berkaitan dengan hasil pembelajaran, secara umumnya hasil pembelajaran yang baik dapat di dapat anak manakala anak tidak dibebankan dengan pembelajaran. Orang tua dapat menggunakan humoran-humoran pada saat membelajari anak dan menjadikan anak sebagai teman belajarnya.[10]

C. Pelaksanaan Pembelajaran PKn di STAIN Kudus

Sebelum dibahas pelaksanaan pembelajaran PKn di STAIN Kudus, terlebih dahulu dipaparkan silabus dan Satuan Perkuliahan (SAP) yang menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran, sebagai berikut:

---

[10] Raymond J. Wlodkowski dan Judith H. Jaynes, *Hasrat Untuk Belajar (Membantu Anak-Anak Termotivasi dan Mencintai Belajar)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal 115-121

Dipindai dengan CamScanner

SILABUS
MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGAAN
STAIN KUDUS

Deskripsi:

- Merupakan salah satu mata kuliah dalam komponen MKPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian)
- Kompetensi Mata Kuliah: *pertama*, kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan kewargaan (*Civic Knowledge*) yang terkait dengan materi inti Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*); *kedua*, kecakapan dan kemampuan sikap kewargaan (*Civic Dispositions*) antara lain pengakuan kesetaraan, toleransi, kebersamaan, pengakuan keragaman, kepekaan terhadap masalah warga negara antara lain masalah demokrasi dan hak asasi manusia; dan *ketiga*, Kecakapan dan kemampuan mengartikulasikan keterampilan kewargaan (*Civic Skills*) seperti kemampuan berpartisiasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.
- Tujuan mata kuliah ini adalah : a) Membentuk kecakaan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat; (b) Menghasilkan mahasiswa yang berpikir kritis dan bertindak demokratis; (c) Mengembangkan pada diri mahasiswa kultur demokrasi; (d) Mampu membentuk mahasiswa menjadi *good and responsible citizen* (warganegara yang baik dan bertanggung jawab) melalui penanaman moral dan keterampilan *(social skills)* sehingga kelak mereka mampu memahami dan memecahkan persoalan-persoalan aktual kewarganegaraan.
- Metode pembelajaran yang digunakan adalah *Lecturing, Problem solving*, pro kontra, *out door activity, small discussion, Role Play*, dan *Brainstorming*.
- Sistem Evaluasi: *Essay test*, partisipasi, dan paper.

Dipindai dengan CamScanner

Pertemuan ke-	Pokok Bahasan
1	Kontrak belajar & Pendahuluan
2	Identitas nasional
3	Negara
4	Warga Negara
5	Konstitusi
7	Demokrasi
8	Otonomi Daerah
9	Good Governance
10	HAM
11	Masyarakat Madani

Bahan Bacaan:

Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Demokrasi, Hak Asasi Manusia, danMasyarakat Madani)*, Jakarta: Tim ICCE UIN Jakarta, 2003

Abdul Rozak, dkk, *Buku Suplemen Pendidikan Kewargaan (Demokrasi, Hak Asasi Manusia, danMasyarakat Madani)*, Jakarta: Tim ICCE UIN Jakarta, 2004

Alexander Irwan, dkk, *Nasionalisme Etnisitas, Pertaruhan sebuah Wacana Kebangsaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Suharko, *Merajut Demokrasi, Hubungan NGO, Pemerintah, dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005

Pradjarta, dkk (Penyunting), *Desentralisasi dalam Perspektif Lokal*, Salatiga: Pustaka Percik, 2004

Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1999

Selain silabus di atas, ada juga silabus yang digunakan di beberapa jurusan di STAIN Kudus, yaitu:

Dipindai dengan CamScanner

SILABUS
MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGAAN
STAIN KUDUS

MATA KULIAH	:	PendidikanKewarganegaraan
KODE	:	PAIMPK-01/PBAMPK-01
KOMPOPNEN	:	MPK
JURUSAN	:	Tarbiyah & Dakwah
PROGRAM STUDI	:	Pendidikan Agama Islam (PAI)/Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
PROGRAM	:	Strata Satu (S1)
BOBOT	:	3 SKS
STANDAR KOMPETENSI MATA KULIAH	:	Menjadi warga Negara Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai nasionalisme, civilized, demokrasi dan sadar akan hak dan kewajibannya
KOMPTENSI DASAR MATA KULIAH	:	• Mahasiswa mengetahui konsep-konsep tentang kewarganegaraan, demokrasi, hak asasi manusia dan *civil society* • Mahasiswa dapat memberdayakan konsep-konsep tersebut dalam hidup bermasyarakat dan bernegara • Mahasiswa mampu berperan aktif dalam terciptanya masyarakat madani
MATERI POKOK	:	1. Membangun Negara yang Berkeadaban 2. Konstitusi dan Tata Perundang-undangan 3. Identitas Nasional dan Globalisasi 4. Globalisasi teori dan aksi 5. Otonomi daerah 6. Tata Kelola Pemerintah yang baik dan

Dipindai dengan CamScanner

		bersih 7. Hak Asasi Manusia 8. Membangun Masyarakat Madani
METODE	:	*Power of two, Active Debate*
PENILAIAN	:	*One Paragraph Summary*
SUMBER BELAJAR	:	• Abdurrahman (editor), *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah* • Ahmad syafi'I Ma'arif, *Islam dan masalah kenegaraan* • Amin, M. Masyhur dan Muhammad Najib, *Agama, demokrasi dan Transformasi Sosial* • Anwar M. Syafei, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia* • Anwar, Dewi Fortuna, "*Format Politik Orde Baru dan Agenda Pengembangan Demokrasi Politik*" • Az-Zumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani* • Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia* • Apter, David E., *Pengantar Analisa Politik* • Bahtiar Efendi, *Islam dan negara* • Kansil CST, *Sistem pemerintahan Indonesia* • Khoiron, dkk, *Pendidikan Politik bagi Warga Negara* • MS. Kaelan, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, *Membahas Proses Reformasi paradigma Reformasi*

Dipindai dengan CamScanner

		Masyarakat Madani • Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*

Silabus di atas kemudian oleh dosen masing-masing diterjemahkan ke dalam Satua Acara Perkuliahan, sebagai berikut:

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 1		
MATA KULIAH	:	**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**
KODE	:	**PAIMPK-01**/PBAMPK-01
KOMPONEN	:	**MPK**
JURUSAN	:	Tarbiyah
PROGRAM STUDI	:	Pendidikan Agama Islam (PAI) /Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
PROGRAM	:	Strata satu (S1)
BOBOT	:	3 SKS
PERTEMUAN KE	:	I
WAKTU	:	150 Menit
STANDAR KOMPETENSI	:	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami konsep dasar pendidikan kewarganegaraan.
KOMPETENSI DASAR	:	Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar pendidikan Islam.
INDIKATOR	:	1. Mampu menganalisa konsep dasar pendidikan kewargaan.
		2. Menyadari pentingnya pendidikan kewarganegaraan.
		3. Mampu menganalisa standar kompetensi dan kompetensi dasar.
MATERI POKOK	:	**Pendahuluan.**

Dipindai dengan CamScanner

METODE PEMBELAJARAN	:	1. Lecturing
		2. Information search.
PENILAIAN	:	*Short Answer.*
BAHAN/SUMBER	:	Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 2		
MATA KULIAH	:	**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**
KODE	:	**PAIMPK-01**/PBAMPK-01
KOMPONEN	:	**MPK**
JURUSAN	:	Tarbiyah
PROGRAM STUDI	:	Pendidikan Agama Islam (PAI) /Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
PROGRAM	:	Strata satu (S1)
BOBOT	:	3 SKS
PERTEMUAN KE	:	II
WAKTU	:	150Menit
STANDAR KOMPETENSI	:	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami konsep negara yang berkeadaban.
KOMPETENSI DASAR	:	Mahasiswa mampu menguasai konsep negara yang berkeadaban.
INDIKATOR	:	1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian negara.
		2. Mampu menjelaskan tujuan dan unsur-unsur negara.
		3. Mampu menganalisa teori terbentuknya negara.

Dipindai dengan CamScanner

MATERI POKOK	:	**Membangun negara yang berkeadaban.**
METODE PEMBELAJARAN	:	- *Reading guide.* - *Small group discussion.*
PENILAIAN	:	*One paraghrap summary*
BAHAN/SUMBER	:	• Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 3		
MATA KULIAH	:	**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**
KODE	:	**PAIMPK-01**/PBAMPK-01
KOMPONEN	:	**MPK**
JURUSAN	:	Tarbiyah
PROGRAM STUDI	:	Pendidikan Agama Islam (PAI) /Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
PROGRAM	:	Strata satu (S1)
BOBOT	:	3 SKS
PERTEMUAN KE	:	III
WAKTU	:	150Menit
STANDAR KOMPETENSI	:	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami konstitusi dan tata perundang-undangan.
KOMPETENSI DASAR	:	Mahasiswa mampu memahami konstitusi dan tata perundang-undangan.
INDIKATOR	:	1. Mampu menjelaskan konsep dasar konstitusi.
		2. Mampu menganalisa urgensi konstitusi.
		3. Mampu memahami sejarah konstitusi Indonesia.
MATERI POKOK	:	**Konstitusi dan tata perundang-undangan.**

Dipindai dengan CamScanner

METODE PEMBELAJARAN	:	- *Reading guide* - *Power of two*
PENILAIAN	:	Oral Question
BAHAN/SUMBER	:	• Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 4		
MATA KULIAH	:	**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**
KODE	:	**PAIMPK-01**/PBAMPK-01
KOMPONEN	:	**MPK**
JURUSAN	:	Tarbiyah
PROGRAM STUDI	:	Pendidikan Agama Islam (PAI) /Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
PROGRAM	:	Strata satu (S1)
BOBOT	:	3 SKS
PERTEMUAN KE	:	IV
WAKTU	:	150Menit
STANDAR KOMPETENSI	:	Memiliki kemampuan memahami identitas nasional dan globalisasi.
KOMPETENSI DASAR	:	Mampu memahami identitas nasional dan globalisasi.
INDIKATOR	:	1. Mampu menganalisa hakikat identitas nasioanl.
		2. Menganalisa unsur-unsur pembentukan identitas nasional.
		3. Mampu mengkritisi globlisasi.
MATERI POKOK	:	**Identitas nasional dan globalisasi.**
METODE	:	- *Poster Comment.*

Dipindai dengan CamScanner

PEMBELAJARAN		- *Small group discusion.*
PENILAIAN	:	One paraghrap summary.
BAHAN/SUMBER	:	• Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 5		
MATA KULIAH	:	**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**
KODE	:	**PAIMPK-01**/PBAMPK-01
KOMPONEN	:	**MPK**
JURUSAN	:	Tarbiyah
PROGRAM STUDI	:	Pendidikan Agama Islam (PAI) /Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
PROGRAM	:	Strata satu (S1)
BOBOT	:	3 SKS
PERTEMUAN KE	:	V
WAKTU	:	150Menit
STANDAR KOMPETENSI	:	Mahasiswa memiliki kemampuan penguasaan dan pengaplikasian demokrasi.
KOMPETENSI DASAR	:	Mampu menguasai konsep demokrasidan mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi.
INDIKATOR	:	1. Mampu menganalisa hakikat demokrasi.
		2. Menerima demokrasi sebagai pandangan hidup.
		3. Mengkritisi hubungan Islam dan demokrasi.
MATERI POKOK	:	**Demokrasi: teori dan aksi.**
METODE PEMBELAJARAN	:	- *Reading guide.*
		- *Critical Inscident.*

Dipindai dengan CamScanner

		- *Small Group Discussion.*
PENILAIAN	:	*One paraghrap summary.*
BAHAN/SUMBER	:	• Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 6		
MATA KULIAH	:	**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**
KODE	:	**PAIMPK-01**/PBAMPK-01
KOMPONEN	:	**MPK**
JURUSAN	:	Tarbiyah
PROGRAM STUDI	:	Pendidikan Agama Islam (PAI) /Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
PROGRAM	:	Strata satu (S1)
BOBOT	:	3 SKS
PERTEMUAN ke	:	VI
WAKTU	:	150Menit
STANDAR KOMPETENSI	:	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami konsep otonomi daerah.
KOMPETENSI DASAR	:	Mahasiswa mampu menguasai konsep otonomi daerah.
INDIKATOR	:	1. Mampu menganalisa hakikat identitas nasioanl.
		2. Mampu menganalisa prinsip-prinsip otonomi daerah.
		3. Mampu mengkritisi pelaksanaan otonomi daerah.
MATERI POKOK	:	**Otonomi daerah.**
METODE PEMBELAJaran	:	- *Critical Incident.*
		- *Active debate*

Dipindai dengan CamScanner

PENILAIAN	:	Out door activity
SUMBER	:	• Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 7		
MATA KULIAH	:	**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**
KODE	:	**PAIMPK-01**/PBAMPK-01
KOMPONEN	:	**MPK**
JURUSAN	:	Tarbiyah
PROGRAM STUDI	:	Pendidikan Agama Islam (PAI) /Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
PROGRAM	:	Strata satu (S1)
BOBOT	:	3 SKS
PERTEMUAN KE	:	VII
WAKTU	:	150Menit
STANDAR KOMPETENSI	:	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.
KOMPETENSI DASAR	:	Mahasiswa mampu menguasai konsep tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.
INDIKATOR	:	1. Mampu menganalisa good governance.
		2. Mampu menganalisa prinsip-prinsip *good governance.*
		3. Mampu mengkritisi kebijakan publik.
MATERI POKOK	:	**Tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.**
METODE PEMBELAJARAN	:	- *Small group discusion.*
PENILAIAN	:	*One paraghrap summary.*

Dipindai dengan CamScanner

BAHAN/SUMBER	:	• Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 8		
MATA KULIAH	:	**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**
KODE	:	**PAIMPK-01**/PBAMPK-01
KOMPONEN	:	**MPK**
JURUSAN	:	Tarbiyah
PROGRAM STUDI	:	Pendidikan Agama Islam (PAI) /Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
PROGRAM	:	Strata satu (S1)
BOBOT	:	3 SKS
PERTEMUAN KE	:	VIII
WAKTU	:	150Menit
STANDAR KOMPETENSI	:	Mahasiswa memiliki kemampuan dan kecakapan memahami HAM
KOMPETENSI DASAR	:	Mahasiswa mampu menguasai konsep HAM.
INDIKATOR	:	1. Mampu menganalisa pengertian HAM.
		2. Mampu menjelaskan perkembangan HAM.
		3. Mampu menganalisa pelanggaran HAM.
MATERI POKOK	:	**HAM**
METODE PEMBELAJARAN	:	- *Critical Incident.*
		- *Jigsaw*
PENILAIAN	:	*Out door Activity.*
BAHAN/SUMBER	:	• Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Dipindai dengan CamScanner

		Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 9		
MATA KULIAH	:	**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**
KODE	:	**PAIMPK-01**/PBAMPK-01
KOMPONEN	:	**MPK**
JURUSAN	:	Tarbiyah
PROGRAM STUDI	:	Pendidikan Agama Islam (PAI) /Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
PROGRAM	:	Strata satu (S1)
BOBOT	:	3 SKS
PERTEMUAN KE	:	IX
WAKTU	:	150Menit
STANDAR KOMPETENSI	:	Mahasiswa memiliki kemampuan dan kecakapan memahami konsep masyarakat madani.
KOMPETENSI DASAR	:	Mahasiswa mampu menguasai konsep masyarakat madani.
INDIKATOR	:	1. Mampu menganalisa konsep masyarakat madani.
		2. Mampu menghayati nilai-nilai masyarakat madani.
		3. Mampu mengimplementasikan nilai-nilai masyarakat madani.
MATERI POKOK	:	**Membangun masyarakat madani.**
METODE PEMBELAJARAN	:	- *Power of two.*
		- *Active debate.*
PENILAIAN	:	*One paraghrap summary.*
BAHAN/SUMBER	:	• Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.*

Dipindai dengan CamScanner

Silabus dan SAP di atas menggambarkan bagaimana pembelajaran PKn di STAIN Kudus berlangsung, meski beberapa dosen banyak yang melakukan penambahan materi maupun metode dengan tujuan semakin menghidupkan pembelajaran di kelas.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

BIAS GENDER PADA PEMBELAJARAN PKN: Studi Kasus di STAIN Kudus

Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan menurut Collins (1975),[1] sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Dalam tatanan itu, menurut Simone de Beauvoir (2003) dalam bukunya *The Second Sex*, perempuan ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas dua), yang berada di bawah superioritas laki-laki. Perempuan selalu dianggap bukan makhluk penting, melainkan sekedar pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki. Akibatnya, ada pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan biasanya ditempatkan di ranah domestik, sedangkan laki-laki berada di ranah publik.[2]

---

[1] Dikutip oleh Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 86

[2] Simone De Beauvoir, *The Second Sex Kehidupan Perempuan*, diterjemahkan oleh Toni B. Febriantono, dkk, Pustaka Prometea, 2003, hlm ix

Dipindai dengan CamScanner

Akibat yang paling jelas dari situasi sosial seperti di atas adalah marjinalisasi terhadap perempuan[3] dari arena publik seperti arena politik, ekonomi, serta pendidikan. Bentuk marginalisasi terhadap perempuan di bidang pendidikan dapat kita lihat dari tingginya angka buta huruf perempuan, rendahnya angka partisipasi sekolah, dan seterusnya.

Di Indonesia, penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang buta huruf mencapai 9,48 persen, sedangkan laki-laki hanya 4,35 persen. Kemudian, besaran rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki pun lebih tinggi pada kisaran satu tahun dibandingkan rata-rata lama sekolah penduduk perempuan.[4] Data tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan dalam pendidikan yang salah satunya disebabkan karena belum meratanya akses pendidikan bagi perempuan. Padahal, pada dasarnya hakekat pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia seutuhnya, tanpa membedakan suku bangsa, agama, golongan, kelompok sosial, dan jenis kelamin.

Selain persoalan akses, partisipasi, kontrol atau pelibatan dalam pengambilan keputusan serta hak mendapatkan manfaat pendidikan juga menyimpan persoalan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan (*gender gap*). Beberapa penelitian yang sudah dilakukan dalam rangka mengkaji permasalahan gender dalam pendidikan misalnya penelitian yang dilakukan terhadap

---

[3] Marginalisasi diartikan sebagai proses peminggiran. Lihat Mohtar Mas'oed, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 209

[4] Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI & BPS, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2011*, hlm. 32

Dipindai dengan CamScanner

kelompok dampingan Indonesia Australia Basic Education Project (IAPBE) pada Tahun 2004-2007, dari sekitar 200 madrasah ternyata tidak ada satu pun ketua komite sekolah dijabat oleh perempuan, demikian pula ketua Dewan Pendidikan.[5]

Penelitian lain yang melihat ketimpangan gender di lembaga pendidikan adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Ruhaini Dzuhatin dkk (Tahun 2012) yang berjudul *"Gender component in Islamic Basic Education Project BEP-ADB Departement of Religious Affairs Jakarta"*. Penelitian ini menyebutkan bahwa persoalan kesenjangan jabatan struktural yang berbasis gender sangat lebar. Jabatan kepala madrasah di suatu kabupaten rata-rata berbanding antara 10 laki-laki dengan 3 perempuan. respon keagamaan tentang kepemimpinan membuat laki-laki memandang bahwa peran-peran reproduksi menjadi hambatan bagi perempuan yang menjadi kepala madrasah. Sedangkan perempuan sendiri sering kali dihinggapi sindrom takut sukses karena akan mempengaruhi hubungan dengan suaminya. [6]

Selain aktor pendidikan, persoalan gender juga terdapat pada kurikulum, bahan ajar, dan metode pembelajaran yang secara tidak langsung justru melanggengkan bias-bias gender yang ada, sebagaimana diteliti oleh Mary Astuti, Aisyah Indati, dan Muthali'in yang menyimpulkan bahwa sosialisasi bias gender ada dan berlangsung pada proses pembelajaran di sekolah.

---

[5] Lilik Hamidah, 'Respon Komunitas Madrasah terhadap Upaya PUG dalam Pendidikan', dalam *Jurnal Studi Gender Indonesia*, vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 114

[6] *ibid*

Dipindai dengan CamScanner

Berikut ini akan dipaparkan mengenai indikator kesenjangan gender dalam pendidikan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan gender bidang pendiidkan, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kesenjangan Gender

No	Aspek	Variable
1	Akses dan pemerataan	a. Indeks paritas dan disparitas angka partisipasi kasar b. Indeks paritas dan disparitas angka penerimaan siswa c. Indeks paritas dan disparitas angka buta huruf
2	Mutu dan relevansi	a. Indeks paritas dan disparitas siswa *droup out* b. Indeks paritas dan disparitas siswa mengulang
3	Manajemen pendidikan	a. Indeks paritas dan disparitas jumlah guru b. Indeks paritas dan disparitas jumlah kepala sekolah c. Indeks paritas dan disparitas komposisi kepengurusan sekolah

Tabel 3.2 Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Gender

No	Faktor	Contoh
1	Akses	a. Terdapat keterbatasan akses bagi perempuan untuk menjadi tenaga

Dipindai dengan CamScanner

		pengajar di tingkat SLTP ke atas. b. Jabatan strategis struktural masih didominasi kaum laki-laki.
2	Partisipasi	a. Partisipasi perempuan dalam pembelajaran masih dipengaruhi *sterotype* gender terutama pada pelajaran ketrampilan. b. Penulis buku ajar umumnya adalah laki-laki. c. Partisipasi orang tua murid dalam mendukung kegiatan sekolah masih dipengaruhi *sterotype*.
3	Control	a. Pemegang keputusan pada *stakeholder* umumnya laki-laki. b. Kepengurusan komite sekolah mayoritas laki-laki.
4	Manfaat	a. Sebagai ketidaksamaan akses, partisipasi dan control yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan b. Pemegang jabatan struktural adalah laki-laki.

Bagaimana halnya dengan pembelajaran di perguruan tinggi? Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Dipindai dengan CamScanner

Salah satu mata kuliah yang relevan adalah Pendidikan Kewarganegaraan atau pendidikan kewargaan yang merupakan terjemahan dari *civic education* dan merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semua jenjang pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat 2 yang berbunyi: "Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa".

Selain menjadi sebuah keharusan karena dijamin oleh perundangan, pendidikan kewargaan atau pendidikan kewarganegaraan menjadi penting karena memiliki peran strategis bagi pembentukan karakter (*nation and character building*) di tengah heterogenitas masyarakat Indonesia dan gempuran globalisasi saat ini. Heterogenitas tersebut tergambar dari beragamnya suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia, termasuk juga perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dengan demikian maka PKn dianggap juga sebagai media yang sangat strategis untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di kalangan mahasiswa khususnya maupun masyarakat akademik pada umumnya.

Namun, berdasar hasil penelitian yang penulis lakukan sebelumnya di STAIN Kudus menunjukkan bahwa masih ada permasalahan gender atau bias gender dalam pembelajarannya.

Sebelum dibahas tentang permasalahan gender pada pembelajaran PKN di STAIN Kudus, maka akan dipaparkan terlebih dahulu tentang konsep dasar gender sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

A. Konsep Dasar tentang Gender

Selama lebih dari satu dasawarsa, istilah *gender* bukan lagi menjadi sesuatu yang asing meramaikan berbagai diskusi, seminar, dan pelatihan baik di pemerintahan, akademisi, politisi, media massa, organisasi kemahasiswaan, maupun organisasi kemasyarakatan. Sayangnya, selama itu pula istilah tersebut telah mendatangkan ketidakjelasan-ketidakjelasan dan kesalahpahaman. Antara lain, gender dimaknai 'perempuan', dan gerakan kesetaraan gender dipahami sebagai gerakan perempuan menjadi sama dengan laki-laki, serta gerakan menentang laki-laki.

Kekaburan makna atas istilah gender di atas, telah mengakibatkan wilayah perjuangan gender menjadi terbatas karena seolah – olah hanya berkutat dengan persoalan perempuan. Sehingga tidak heran, kalau ada kegiatan – kegiatan yang nomenklaturnya menyebut kata gender, peserta yang hadir lebih dominan perempuan, dan sebaliknya kegiatan – kegiatan yang berjudul 'perempuan' dianggap sudah memenuhi unsur keadilan gender.

Sempitnya wilayah gerakan kesetaraan gender juga tampak dari anggapan bahwa urusan gender hanyalah tanggung jawab badan tertentu seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. Sementara di lembaga legislatif, Komisi yang membidangi bidang perempuanlah yang dianggap bertanggungjawab mengurusi persoalan gender.

Pemahaman seperti di atas, jelas sangat merugikan baik bagi salah satu jenis kelamin, maupun bagi lembaga yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya kesetaraan gender. Perjuangan kesetaraan gender menghadapi banyak perlawanan yang tidak saja datang dari kaum laki-laki yang

Dipindai dengan CamScanner

merasa terancam "hegemoni kekuasaannya', tapi juga datang dari kaum perempuan sendiri yang tidak paham akan apa yang sesungguhnya dipermasalahkan oleh perjuangan gender. Maka, tidak heran kalau implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah dicanangkan sepuluh tahun silam_sejak keluarnya Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG belum juga terwujud. PUG dimaksud adalah kebijakan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan antara laki-laki dan perempuan.

Riant Nugroho[7] menyebut kegagalan menjelaskan gender kepada publik dengan cara publik_lah faktor utama penyebab kesalahpahaman di atas. Gender, selama ini dijelaskan dengan cara dan bahasa pakar sehingga terkesan gender adalah sesuatu yang datang dari dan milik pakar.

WID: Penyebab Kesalahpahaman

Kembali lagi pada persoalan kesalahpahaman atas pemaknaan gender yang disamakan dengan perempuan, hal tersebut juga disebabkan oleh adanya paradigma pembangunan yang telah lama berjalan, yaitu apa yang disebut dengan pendekatan *Women in Development* (WID) yang memposisikan perempuan sebagai sumberdaya manusia yang sangat berharga sehingga perempuan harus diikutksertakan dalam pembangunan. Agenda utama program WID adalah bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan. Asumsinya, penyebab keterbelakangan perempuan adalah karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan.[8]

---

[7] Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008a, hlm. vi

[8] Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 60

Dipindai dengan CamScanner

Perhatian utama pendekatan WID ini adalah pada pemberian peran produktif perempuan dalam pembangunan, seperti inisiatif pengembangan teknologi yang lebih baik dan tepat guna agar dapat meningkatkan beban kerja perempuan. Tujuanya adalah menekankan pada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan khususnya berkaitan dengan pendapatanya. Konsep ini dianggap jawaban atas kegagalan teori developmentalist dalam menutup *gap* antara laki-laki dan perempuan.[9]

Seperti diketahui, konsep pengembangan pertama yang dikembangkan teori *developmentalist*, di awal tahun 1960-an adalah **modernisasi**: memindahkan nilai modern (termasuk aset, peluang) ke masyarakat tradisional dengan model *trickle down* atau pembangunan didistribusikan kepada masyarakat dan organisasi yang terbatas dengan asumsi bahwa kesejahteraan yang diciptakan oleh pembangunan akan menetes kepada masyarakat lain. Adapun, kelompok masyarakat yang terpilih untuk menikmati pembangunan terlebih dahulu adalah laki-laki karena dianggap mampu menghasilkan pemasukan bagi keluarga. Namun, kenyataanya, efek *trickle down* ternyata tidak berhasil. Dalam konteks hubungan sosial – ekonomi antara laki-laki dan perempuan terdapat jurang ketidaksejajaran yang cukup lebar. Maka, Tahun 1970-an muncul istilah WID sebagai kritik terhadap teori *trickle down*. Modernisasi dianggap mempunyai dampak berbeda pada laki-laki dan perempuan, dan modernisasi tidak mampu meningkatkan hak dan status perempuan, justru proses pembangunan yang ada hanya mengesampingkan dan memperparah posisi perempuan di negara berkembang.

[9] Riant Nugroho, *Op.Cit*, 2008a, hlm. 72

Dipindai dengan CamScanner

Perempuan juga kekurangan akses ke dalam 'nilai pembangunan' khususnya bidang ekonomi.[10]

Kritik terhadap teori *Trickle Down* pertama muncul tahun 70-an. Buku Ester Boserup berjudul *Women's Role in Economic Development*, adalah serangan kaum feminis pertama atas asumsi bahwa teknologi modernisasi melalui teknologi membebaskan perempuan. Bagi Boserup, peningkatan teknologi seperti pertanian, justru telah telah merendahkan status perempuan, karena menyingkirkan akses perempuan terhadap kerja produktif. Senada dengan Boserup, Barbara Rogers, dalam studinya terhadap perempuan dalam program pembangunan bantuan bank dunia, menyimpulkan bahwa proses pembangunan mereka adalah bias kaum laki-laki. Di jawa misalnya, sebelumnya kaum perempuan memiliki peran dalam pertanian - khususnya di musim panen dan tanam.[11] Namun, sejak revolusi hijau, dengan diperkenalkannya tipe padi baru disertai pengenalan teknologi baru, secara sistematik perempuan tergusur dari peran semula.

Kebijakan *developmentalism* juga telah menimbulkan kerusakan lingkungan. Watak *anti-nature* memunculkan masalah lingkungan bagi rakyat di Dunia Ketiga. Kerusakan hutan tropis di Amerika Latin dan Asia Tenggrara merupakan bukti nyata tentang *anti-nature* dari *developmentalism*.[12]

Uraian di atas menggambarkan bahwa *developmentalism* bukanlah persoalan ekonomi belaka, tetapi juga menyangkut persoalan budaya, pengetahuan, dan juga

---

[10] Riant Nugroho, *ibid*, 2008a, hlm. 73
[11] Mansour Fakih, Op. Cit, hlm 62
[12] *Ibid*, hlm. 63

Dipindai dengan CamScanner

lingkungan. Pada posisi inilah gagasan WID dianggap satu-satunya jalan guna memperbaiki status nasib berjuta-juta perempuan di negara Dunia Ketiga. Dengan cepat WID menjadi satu-satunya kebijakan yang berkaitan dengan perempuan di hampir semua negara Dunia Ketiga.

Diskursus WID dimulai ketika pemerintah Amerika Serikat mengumumkan *"The percy amandment to the 1973 foreign assistance act"* yang mencantumkan perlunya perhatian terhadap perempuan dalam pembangunan. Amandemen itu mempengaruhi PBB pada tahun 1974 yang kemudian memproklamirkan *International Decade of Wowen* (1976 – 1985). Biro WID mulai di buka di USAID tahun 1974, dan sejak itulah pengetahuan, kebijakan, dan sumber informasi telah diciptakan dan diekspor guna mempengaruhi jutaan nasib perempuan di dunia ketiga. Dan sejak itu pula, hampir serentak, semua pemerintah dunia ketiga beramai-ramai memasukkan agenda WID ke dalam program pembangunan masing-masing. Departemen urusan peranan perempuan pun menjadi mode di hampir pemerintah di Dunia Ketiga. WID senantiasa diajukan sebagai jawaban kaum *developmentalism* atas kritik kaum feminis yang menganggap pembangunan telah mengabaikan perempuan.[13]

Namun, setelah kurang lebih sepuluh tahun berjalan, banyak orang mulai menyangsikan dan mengajukan kritik mendasar terhadap konsep WID. WID dianggap bagian dari agenda Dunia Pertama untuk mendominasi Dunia Ketiga.

---

[13] Mansour Fakih, *Ibid,* hlm.60. Perhatian yang lebih terhadap salah satu jenis kelamin_yaitu perempuan inilah yang menyebabkan banyak orang mendefinisikan gender adalah urusan tentang dan untuk perempuan.

Dipindai dengan CamScanner

Kemudian, dalam pelaksanaanya, ternyata WID tidak terlalu berhasil dalam menghapus masalah diskriminasi terhadap perempuan. Dari aspek pendapatan, mungkin perempuan mengalami peningkatan tetapi dari aspek pengambilan keputusan tidak terjadi perubahan yang signifikan atau dengan kata lain, tidak terjadi peningkatan kualitas hidup pada perempuan.[14] WID lebih menghasilkan penjinakan dan pengekangan perempuan Dunia Ketiga, ketimbang membebaskanya. Banyak kajian telah dilakukan atas masalah ini. Ada yang mengkritik dari segi ekonomi dan teknologi, aspek isu diskursus dan pengetahuan/ kekuasaan, serta aspek lingkungan. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa WID sebetulnya hanyalah strategi dan diskursus *developmentalism* untuk melanggengkan dominasi dan penindasan perempuan Dunia Ketiga, melalui upaya penjinakkan (*Cooptation*) dan pengekangan (*Regulation*) perempuan.

Dengan analisis WID di atas, maka muncul pendekatan *Gender And Development* (GAD) yang meletakkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya transformasi WID ke GAD ini tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui era WAD *(Women And Development*) yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.3
WID, WAD, dan GAD

	WID	WAD	GAD
Asal – usul	Tahun 1970an diperkenalkan	Pertengahan Tahun 1970an,	Tahun 1980-an, alternatif dari

[14] Riant Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 74

Dipindai dengan CamScanner

	oleh kaum feminis liberal Amerika	muncul sebagai kritik terhadap WID	WID
Landasan Teori	Modernisasi	Dependensi	Feminis-sosialis
Fokus	Partisipasi perempuan dalam pembangunaan	Kritisi bahwa pengintegrasian pada praktiknya adalah marginalisasi	Pendekatan holistik berkenaan dengan peran gender dan peran sex
Kontribusi	Perempuan nampak dalam proses pembangunan	Pemahaman terdapatnya kesenjangan struktural	Kesetaraan dan kebersamaan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan
Gambaran umum	Perempuan dianggap dipisahkan dari pembangunan, karena itu harus diintegrasikan	Desakan perubahan struktural dalam penguasaan sumberdaya produktif	Penolakan dikotomi publik/domestik; penguatan hak-hak perempuan untuk mencapai kesetaraan relasi dengan laki-laki

Sumber: Visvanathan, *The Women, Gender and Development Reader*, London: Zed Books Ltd,1997, hlm. 17, dikutip Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik*,, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008a, hlm. 75

Diantara ketiga paradigma di atas, paradigma yang mengedepan adalah WID dan GAD karena paradigma WAD

Dipindai dengan CamScanner

fokus kepada konsep kritis semata dan tidak mampu memberikan solusi yang dapat dilaksanakan.

Dari WID ke GAD

Sebagai respon dan evaluasi dari tidak terlalu berhasilnya konsep WID, kemudian pada tahun 1990an muncul konsep baru yang kemudian dikenal sebagai konsep *Gender and Development* (GAD). Konsep ini lebih didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Konsep ini juga didasarkan pada suatu asumsi bahwa konstruksi sosial yang dibuat atas peran perempuan dan laki-laki dapat diubah. Peran tradisional yang tadinya mutlak milik kaum perempuan harus digeser dan melibatkan tanggung jawab kaum laki-laki juga. Maka dari itu, konsep GAD ini tidak hanya melibatkan perempuan dalam proses-proses pembangunan tetapi juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atas proyek pembangunan serta kaum laki-laki harus bisa memahami dan memikirkan kebutuhan-kebutuhan kaum perempuan dalam setiap program atau proyek. Jadi kalau WID hanya berdampak pada perempuan saja, sedangkan GAD berdampak pada keduanya. Perbedaan kedua paradigma tersebut, lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4. WID Versus GAD

	WID	GAD
Pendekatan	• Berusaha mengintegrasikan perempuan ke dalam proses pembangunan	• Berusaha memberdayakan dan mentransformasi hubungan tak setara antara dan wanita

Dipindai dengan CamScanner

Fokus	• Perempuan	• Hubungan antara pria dan wanita
Permasalahan	• Pengesampingan perempuan dari proses pembangunan	• Hubungan kekuatan tak setara yang menghalangi pembangunan yang layak dan partisipasi penuh perempuan
Sasaran	• Pembangunan yang lebih efisien dan efektif	• Pembangunan yang layak dan efektif • Pria dan wanita berbagi dalam pengambilan keputusan dan kekuasaan
Strategi	• Menerapkan proyek-proyek perempuan, unsur-unsur perempuan, dan proyek terpadu • Meningkatkan produktivitas dan penghasilan perempuan • Meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola rumah tangganya.	• Mengidentifikasi dan memperuntukkan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang yang ditentukan pria dan perempuan untuk meningkatkan kondisi mereka.

Sumber: CEPDA, 1996, dikutip oleh Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaanya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008b, hlm. 179.

Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan WID berangkat dari asumsi bahwa ketidakadilan

Dipindai dengan CamScanner

gender disebabkan oleh faktor intern perempuan sendiri, sehingga proyek/program pembangunan lebih banyak berupa pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, sedangkan pendekatan GAD berangkat dari asumsi bahwa struktur dan proses politiklah yang menciptakan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan dalam sumber daya (akses dan kontrol), kesempatan dan manfaat serta pengambilan keputusan (partisipasi dan representasi). Dengan demikian, transformasi sosial adalah jawabanya.

Transformasi sosial yang dimaksud adalah semacam proses penciptaan hubungan yang secara fundamental merupakan sesuatu yang baru dan lebih baik. Yang dimaksud hubungan disini adalah struktur, yakni hubungan ekonomi yang eksploitatif menuju struktur tanpa eksploitasi, hubungan kultur hegemonik diubah menjadi struktur politik yang nonrepresif, struktur gender yang mendominasi perempuan menuju ke sektor yang membebaskan atau yang disebut dengan transformasi gender.

Jika WID bertujuan memproses persamaan kaum laki-laki dan perempuan, maka transformasi gender merupakan gerakan pembebasan perempuan dan laki-laki dari sistem dan struktur yang tidak adil. Dengan demikian transformasi gender merupakan upaya pembebasan dari segala bentuk penindasan –baik sruktural maupun personal, kelas, warna kulit dan ekonomi international.

Tujuan gerakan transformasi gender tidak sekedar memperbaiki status perempuan yang indikatornya menggunakan norma laki-laki, melainkan memperjuangkan martabat dan kekuatan perempuan. Hal tersebut membutuhkan perubahan peran –baik perempuan maupun laki-laki. Dalam hal ini kekuatan tidak berarti mendominasi

Dipindai dengan CamScanner

yang lain. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan internal, dalam rangka mengontrol hidup dan jasad, juga kemampuan meraih akses terhadap alokasi sumber-sumber material dan material. Transformasi gender menolak integrasi perempuan ke dalam *develompmentalism* Karena tujuan pengintergrasian perempuan tidak memberikan pilihan dan suara untuk mempertahankan kehidupan macam apa yang diidamkan oleh kaum perempuan, berbagi kekuasaan.

Pergeseran pendekatan ini merupakan angin segar karena meletakkan kesetaraan gender di intinya atau yang disebut dengan *gender mainstreaming. Gender mainstreaming* yang diterjemahkan sebagai 'Pengarusutamaan Gender' (PUG) pertama kali muncul saat Konferensi PBB untuk Perempuan IV di Beijing tahun 1995. waktu itu, berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender dipetakan dan PUG didesakkan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Adapun bunyi *Platform Beijing for Action* tersebut berbunyi: "...pemerintah dan pihak-pihak lain harus mempromosikan kebijakan *gender mainstreaming* secara aktif dan nyata terlihat dalam semua kebijakan dan program, sehingga sebelum keputusan diambil, analisis tentang dampak kebijakan terhadap perempuan dan laki-laki telah dilakukan."[15]

Sejalan dengan pergeseraan paradigma pembangunan dari WID ke GAD, paradigma pembangunan di Indonesia pun mengalami pergeseran dari pembangunan

---

[15] *Jurnal Perempuan*, Edisi 50 hlm. 12

Dipindai dengan CamScanner

yang meletakkan perempuan di intinya ke arah pembangunan yang meletakkan kesetaraan gender di intinya. PUG pun secara resmi diadopsi di Indonesia pada Tahun 2000 dengan dikeluarkanya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. kemunculan dasar hukum ini merupakan satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mengikuti kesepakatan internasional, serta desakan masyarakat sipil agar pemerintah melakukan tindakan – tindakan konkrit dan sistematis dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Gender: Definisi & arti

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisain yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Senada dengan Robert Stoller Ann Oakley (1972) mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.[16]

Pada Sumber lain, Oakley (1972) dalam *Sex, Gender and Society* menuturkan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sementara itu perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin atau yang dikenal dengan istilah sex.. Gender merupakan *behavioral difference* antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan

---

[16] Mansour Fakih, *Analisis Gender & transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 7, dikutip oleh Riant Nugroho, *op.cit*, 2008b, hlm. 3

Dipindai dengan CamScanner

ketentuan Tuhan melainkan dicipta oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang.[17]

Dalam *The Cultural Construction of Sexuality* sebagaimana diuraikan oleh Caplan (1987) bahwa *behavioral difference* antara laki-laki dan perempuan bukan sekedar biologis, namun melalui proses kultural dan sosial. Dengan demikian, gender dapat berubah dari tempat, ke tempat, dari waktu ke waktu, dari kelas ke kelas, atau dengan kata lain gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat lain.[18] Perbedaan – perbedaan ini akan lebih diurai pada Bagian 2 buku ini tentang 'Gender di Indonesia'. Sekalipun demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal, yaitu: 1) gender tidak identik dengan jenis kelamin, dan 2) gender merupakan dasar pembagian kerja di masyarakat.

Konsep lainya diungkapkan oleh Mansour Fakih yang mendefinisikan gender sebagai sesuatu yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, kuat dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempun yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya saja di zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki tetapi pada zaman lain dana ditempat yang beda juga, laki-laki yang lebih

---

[17] *Ibid*, hlm. 3

[18] Riant Nugroho, Op.Cit

Dipindai dengan CamScanner

kuat. Juga perubahan bisa terjadi cdari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Di suku tertentu, perempuan di pedesan lebih kuat dibandingkan laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari satu kelas ke kelas yang lain, itulah yang dikenal dengan konsep gender.[19]

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran agama ataupun negara. Melalui proses panjang sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan tuhan.

Sebaliknya, melalui dialektika, konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya, karena konstruksi social gender kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif maka kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasi dan termotivasi untuk menjadi atau menuju kesifat gender yang ditentukan oleh suatu masyarakat, yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya, Karena kaum perempuan harus lemah lembut maka sejak pagi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh kepada perkembangan emosi dan visi serta

---

[19] Mansour Fakih, *Op. Cit.* hlm. 3

Dipindai dengan CamScanner

ideologi kaum perempuan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan visi dan ideologis selanjutnya. Karena proses sosialisasi berlangsung secara mapan dan lama akhirnya menjadi sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender itu, seperti kaum perempuan lemah lembut dan kaum laki-laki kuat dan perkasa dikonstruksi atau dibentuk oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditetapkan oleh tuhan. Namun dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat tersebut bisa dipertukarkan maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat dan sama sekali bukanlah kodrat.

Dalam menjernihkan perbedaan antara seks dan gender ini yang menjadi masalah adalah terjadi kerancuan dan pemutarbalikan makna tentang apa yang disebut seks dan gender. Dewasa ini terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, dimana apa yang sesungguhnya gender karena pada dasarnya konstruksi social justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan tuhan. Justlah sebagian besar yang didewasa ini yang sering dianggap atau dinamanakan sebagai "kodrat wanita" adalah konstruksi social dan cultural atau gender. Misalnya saja sering diungkapkan, mendidik anak, mengelola, dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap sebagai "kodrat wanita". Padahal kenyataannya bahwa kaum perempuan memiliki peran gender dalam mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi cultural dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, boleh jadi urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan kaum laki-laki. Oleh karena jenis pekerjaan itu bisa dipertukarkan

Dipindai dengan CamScanner

dan tidak bersifat universal, apa yang sering disebut sebagai "kodrat wanita" atau takdir tuhan atas wanita dalam kasus mendidik anak dan mengatur kebersihan rumah tangga, sesungguhnya, adalah gender.

Setelah jelas perbedaan antara konsep jenis kelamin (seks) dan gender, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa perbedaan jenis kelamin harus melahirkan perbedaan-perbedaan gender? Apa permasalahan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender tersebut? Dengan kata lain, kalau perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki dapat dibedakan dari perbedaan gender –bahwa kaum perempuan itu tidan rasional, emosional, lemah lembut, dan bahwa laki-laki memiliki sifat rasional, kuat, lantas di mana letak masalahnya?

Uraian selanjutnya akan dibahas mengenai persoalan – persoalan yang ditimbulkan karena adanya perbedaan gender, yaitu ketidakadilan dalam berbagai segi kehidupan, baik ketidakadilan terhadap laki-laki maupun perempuan.

Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan[20]

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui pelbagai

[20] Tulisan ini bersumber dari Mansour Fakih, *Ibid*, hlm. 12-23

Dipindai dengan CamScanner

manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotipr atau melalui pelabelan negatif, kekerasa (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satupun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih esensial, dari yang lain. Misalnya, marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi karena stereotipe tertentu atas kaum perempuan dan itu menyumbang kepada subordinasi, kekerasan kepada perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visis kaum perempuan sendiri. Dengan demikian, kita tidak bisa menyatakan bahwa marginalisasi kaum perempuan adalah menentukan dan terpenting dari yang lain dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian lebih. Atau sebaliknya, bahwa kekerasan fisik (*violence*) adalah masalah paling mendasar yang harus dipecahkan terlebih dahulu.

Uraian berikut membahas lebih rinci masing-masing manifestasi ketidakadilan gender.

1. Gender dan marginalisasi perempuan

Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh pelbagai kejadian, misalnya penggusuran, bencana alam atau proses

Dipindai dengan CamScanner

eksploitasi. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi, dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Banyak studi telah dilakukan dalam rangka membahas program pembangunan pemerintah yang menjadi penyebab kemiskinan kaum perempuan. Mislanya, program swasembada, pangan atau revolusi hijau (*green revolution*) secara ekonomi telah menyingkirkan kaum perempaun dari pekerjaannya sehingga memsikinnya mereka di jawa misalnya, program revolusi hijau dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak memungkinkan lagi permanen dengan ani-ani, padahal alat tersebut melekat dan dgunakan oleh kaum perempuan. Akibatnya banyak kaum perempuan miskin di desa termarginalisasi, yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan di sawah pada musim panen berarti program revolusi hijau dirancang tanpa mempertimbangkan aspek gender.

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi ditempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak diantara

Dipindai dengan CamScanner

suku-suku di Indonesia yang tidak meeri hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris setenah dari hak waris laki-lai terhadap kaum perempuan.

2. Gender dan subordinasi

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan sobordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh angirnya akan ke dapur juga. Bahkan, perempua pernah memiliki peraturan jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluraga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktek seperti itu sesungguhnya berangkat dai kesadaran gender yang tidak ada.

3. Gender dan *stereotipe*

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celakanya *stereotipe* selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan.

Dipindai dengan CamScanner

Stereotipe yang diberikan kepada suku bangsa tertentu, misalnya yahudi di barat. Cina di Asia Tenggara, telah merugikan suku bangsa tertesebut. Salah satu jenis stereotipe tersebut adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (*stereotipe*) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, perempuan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialamioleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melatani suami. *Stereotipe* ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempua di nomorduakan. *Stereotipe* terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana. Banyak peraturan perempuan, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut.

4. Gender dan kekerasan

Kekerasan (*violence)* adalah serangan atau invasi (*assault)* terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesame manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut gender-related violence. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bias dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya:

Pertama, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak bias terekspresikan disebabkan oleh pelbagai factor, mislanya, ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, social maupun kultural, tidak ada pilihan lain.

Kedua, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk tindak kekerasan dalam bentyk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*).

Ketiga, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai alas an diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan penyunatan ini. Namun salah satu alas an terkuat adalah, adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini, penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar.

Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan Negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di satu sisi pemerintah melarang dan menangkap mereka, tetapi di pihak lain negara juga menarik pajak dari mereka. Sementara seorang pelacur

Dipindai dengan CamScanner

dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka, selalu ramai dikunjungi orang.

Kelima, kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan nonfisik, yakni pelecahan terhadap kaum perempuan diaman tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.

Keenam, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana (*enforced sterilization*). Keluarga berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali dijadikan korban demi program tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal dari kaum laki-laki juga. Namun, lantaran buas gender, perempuandipaksa sterelisasi yang seringkali membahayakan baik fisik ataupun jiwa mereka.

Ketujuh, adalah jenis kkerasan terselebung (molestation), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan pelbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan maupun di tempat umum, seperti di dalam bis.

Kedelapan, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakuakn di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment.* Ada banyak bentuk pelecehan, dan yang umum terjadi adalah unwanted attention from men. Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual itu sangat relatif karena sering terjadi tindakan itu merupakan usaha untuk

Dipindai dengan CamScanner

bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat, karena tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.

Ada beberapa bentuk yang bias dikategorikan pelecehan seksual. Di antaraya:

- Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar pada sesorang dengan cara yang dirasakan sangat ofensif.
- Menyakiti atau membuat malu seorang dengan omongan kotor.
- Mengintrogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya.
- Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan pekerjaan atau promosi atau janji-janji lainnya.
- Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa seijin dari yang bersangkutan.

6. Gender dan beban kerja

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara anak. Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempun tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda.

Dipindai dengan CamScanner

Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang di anggap masyarakat sebagai jenis "pekerjaan perempuan", seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai "pekerjaan laki-laki" serta dikategorikan "bukan produktif" sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi Negara. Sementara itu, kaum perempuan, karena dianggap gender ini, sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak kaum laki-laki diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaa domestic itu kesemuanya itu telah memperkuat pelanggengan secara cultural dan sruktural beban kerja kaum perempuan.

Bagi kelas menengah dan golongan kaya, beban itu kemudian dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga (*domestic workers*). Sesungguhnya, mereka ini telah menjadi korba dari bias gender di masyarakat. Mereka bekerja lebih lama dan berat, tanpa perlingngan dan dan kejelasan kebijakan negara. Selain belum adanya kemauan politik untuk melindungai mereka, hubungan feodalistik dan bahka bersifat perbudakan tersebut memang belum bias transparan dilihat oleh masyarakat luas.

Manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi ekonomi, sobordinasi, kekerasan, *stereotype* dan beban kerja tersebut terjadi di berbagai tingkatan. Pertama, manifestasi ketidakadilan gender tersebut terjadi di tingkat negara, yang dimaksud disini baiak pada suatu Negara atau organisasi antar Negara seperti PBB. Banyak kebijakan dan hukum Negara, peundang-undangan seperti program kegiatan yang masih mencrminkan sebagian dari

Dipindai dengan CamScanner

manifestasi ketidakadilan gender. Demikian juga banyak kebijakan PBB dan pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh PBB dianggap mencerminkan manifestasi ketidakadilan gender. Kedua, manifestasi tersebut juga terjadi di tempat kerja, organisasi maupun dunia pendidikan. Banyak aturan kerja, manajemen, kebijakan keorganisasian, serta kurikulum pendidikan yang masih melanggengkan ketidakadilan gender tersebut. Ketiga, manifestasi ketidakadilan gender juga terjadi dalam adat istiadat masyarakat di banyak kelompok *etnic*, dalam kultur suku-suku atau dalam tafsiran keagamaan. Bagaimana mekanisme interaksi dan pengambilan keputusan di masyarakat masih banyak mencerminkan ketidakadilan gender tersebut. Keempat, manifestasi ketidakadilan gender itu juga terjadi dilingkungan rumah tangga. Bagaimana proses pengambilan keputusan, pembagian kerja dan interaksi antaranggota keluarga dalam banyak rumah tangga sehari-hari dilaksanakan dalam asumsi bias gender. Oleh karenanya, rumah tangga menjadi tempat kritis dalam mensosialisasikan ketidakadilan gender. Yang terakhir dan yang paling sulit diubah adalah ketidakadilan gender tersebut telah mengakar dalam keyakinan dan menjadi ideologi kaum perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa manifetasi ketidakadilan gender ini sudah mengakar mulai dalam keyakinan masing-masing orang, keluarga, hingga pada tingkat negara yang bersifat global.

B. Permasalahan Gender pada Pembelajaran PKN di STAIN Kudus Tahun Akademik 2012/ 2013

Permasalahan gender adalah permasalahan yang disebabkan oleh pembagian posisi dan peran yang tidak adil

Dipindai dengan CamScanner

antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dengan sifat feminisnya dipandang selayaknya berperan di sektor domestik, sebaliknya laki-laki yang maskulin sudah sepatutnya berperan di sektor publik. Permasalahan gender juga disebut dengan bias gender yang didefinisikan sebagai kegiatan atau kondisi yang memihak atau merugikan salah satu jenis kelamin.[21]

Untuk melihat apakah suatu kegiatan atau kondisi merugikan salah satu jenis kelamin atau tidak, penulis menggunakan metode analisa gender proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya, partisipasi dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

Ada beberapa teknik analisis gender, yaitu;[22]

1. **Teknik Analisis Harvard**

   Sering disebut *Gender Framework Analysis* (GFA), yaitu suatu analisis yang digunakan untuk melihat sesuatu profil gender dari suatu kelompok sosial dan peran gender dalam proyek pembangunan, yang mengutarakan perlunya tiga komponen dan interelasi satu sama lain, yaitu, profil aktivitas, profik akses, dan profil kontrol.

---

[21] Monalisawati.blogspot.com, didownload tanggal 20 September 2012.

[22] Tri Marheini Pujiastuti, 'Metodologi Penelitian Berpespektif Gender', dalam *Jurnal Studi Gender Palastren,* Vol 2 No. 1, 2009, hlm. 7 - 13.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.5 Kerangka Analisis Harvard
Profil aktivitas

Berdasarkan pada pembagian kerja gender (siapa mengerjakan apa, di dalam rumah tangga dan masyarakat) Aktivitas dikelompokkan menjadi aktivitas produktif, reproduktif/rumah tangga, dan sosial – politik – keagamaan. Dengan dibuat daftar apa yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan memungkinkan dikelompokkan juga sesuai dengan umur, etnis, kelas sosial tertentu.

A. Aktivitas Produksi	Laki -Laki		Perempuan	
	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak
Pertanian				
Aktivitas 1				
Aktivitas 2 dst				
Pekerjaan Sampingan				
Aktivitas 1				
Aktivitas 2 dst				
Bekerja di luar				
Aktivitas 1				
Aktivitas 2 dst				
B. Aktivitas Reproduksi				
Terkait dengan air				
Aktivitas ?				
Terkait dengan bahan bakar				
Menyiapkan makanan				
Mengasuh anak				
Terkait dengan kesehatan				
Bersih-bersih				
Terkait dengan pasar				
Lainnya:				

Dipindai dengan CamScanner

Profil Akses dan Kontrol/Manfaat

Akses menunjuk (siapa yang mempunyai akses terhadap sumberdaya produktif termasuk sumberdaya alam seperti tanah, hutan, dan peralatan, pekerja, Kapital atau kredit, pendidikan atau pelatihan) perempuan memeproleh sumberdaya yang mana? Sedangkan control menunjuk tentang perempuan mengambil keputusan atau mengontrol sumberdaya apa? Laki-laki apa?

A. Sumber daya	Laki -Laki		Perempuan	
	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak
Tanah Pertanian Tenaga Kerja Uang Kas Pendidikan/Pelatihan dll				
B. Manfaat Pendapatan dari luar Pemilikan kekayaan Kebutuhan dasar Kekuatan Politik Pendidikan dll				

Faktor-Faktor yang berpengaruh

Faktor-Faktor	Dampak		Kesempatan		Kendala	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Politik Ekonomi Budaya						

Dipindai dengan CamScanner

Pendidikan Lingkungan Hukum Dll						

2. Teknik Analisis Mosser

Adalah suatu teknik analisis yang membantu perencana atau peneliti dalam menilai, mengevaluasi, merumuskan usulan dalam tingkat kebijaksanaan program dan proyek yang lebih peka gender, dengan menggunakan pendekatan terhadap persoalan perempuan (kesetaraan, keadilan, anti kemiskinan, efisiensi, penguatan atau pemberdayaan, identifikasi terhadap peranan majemuk perempuan (reproduksi, produksi, sosial-kemasyarakatan), serta identifikasi kebutuhan gender praktis-dan strategis. Kegunaan teknik moser adalah untuk melihat proyek pembangunan didasarkan pada beberapa hal seperti keterlibatan perempuan dan laki-laki, kebutuhan paraktis dan strategis gender, sebagai salah satu alternatif untuk membantu perencana atau peneliti dalam menilai/mengevaluasi, merumuskan usulan dalam tingkat kebijaksanaan program dan proyek yang lebih peka gender, untuk membantu perencana/peneliti dan pihak lain yang peduli pada nasib perempuan dan mengupayakan perbaikan nasib mereka.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.6 Kerangka Analisis Moser

Perencanaan Gender

Proyek No.Nama	Peranan Yang difokuskan			Kebutuhan Gender Yang dipenuhi		Pendekatan Kebijakan	Ket
	Reprod	Prod.	Kemasy	KGP	KGS		
1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5.							

Intervensi Sektoral

Peran Majemuk Perempuan Serta kebutuhan Gender Praktis dan Strategis

Tipe Intervensi	Peranan Majemuk Perempuan			Keb. Gender Yg terpenuhi	
	Reprod.	Prod.	Kemsy	KGP	KGS
1. Latihan Ketrampilan Memasak Kue Menjahit Pertukangan 2. Kebijakan Perumahan Peraturan tata ruang (Tempat kerja dan rumah) Dipisah Tidak dipisah					

Dipindai dengan CamScanner

3. Layanan Sosial Lokasi Penitipan anak Di pemukiman Di tempat kerja Ibu Di tempat kerja Ayah 4. Layanan Transportasi Jasa Bus untuk jam sibuk Jasa Bus aman untuk Perempuan 5. Proyek dengan Partisipasi Masyarakat Jasa Perempuan dibayar Jasa Perempuan tidak dibayar					

3. Teknik Analisis Longwe

Adalah salah satu teknik analisis yang dikembangkan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan kriteria analisis yang meliputi, kesejahteraan, akses, kesadran kiritis, partisipasi, dan kontrol. Lima dimensi pemberdayaan ini adalah katagori analitis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi, serta mempunyai hubungan hirarkhis. Teknik ini digunakan untuk menganalisis proses pemampuan perempuan tidak hanya dari aspek materialnya saja akan tetapi juga dimensi-dimensi yang telah disebutkan.

Dipindai dengan CamScanner

a. Dimensi Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan material yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, perumahan dan kesehatan yang harus dinikmati oleh perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan tidak dapat terjadi dengan sendirinya di tingkat ini, melainkan harus dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap sumber daya yang merupakan dimensi tingkat kedua.

b. Dimensi Akses

Kesenjangan gender di sini terlihat dari adanya perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan terahadap sumber daya. Lebih rendahnya akses mereka terhadap sumber daya menyebabkan produktivitas perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki. Selain itu dalam banyak komunitas, perempuan diberi tanggung jawab melaksanakan hampir semua pekerjaan domestik sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurusi dan meningkatkan kemampuan dirinya.

c. Dimensi Kesadaran Kritis

Kesenjangan gender di tingkat ini disebabkan adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki dan pembagian kerja gender tradisional adalah bagian dari tatanan abadi. Pemberdayaan di tingkat ini berarti menumbuhkan sikap kritis dan penolakan terhadap cara pandang di atas bahwa subordinasi terhadap perempuan bukanlah pengaturan ilmiah, akan tetapi hasil diskriminatif dari tatanan sosial yang berlaku. Keyakinan bahwa

Dipindai dengan CamScanner

kesetaraan gender adalah bagian dari tujuan perubahan merupakan inti dari kesadaran gender dan merupakan elemen ideologis dalam proses pemberdayaan yang menjadi landasan konseptual bagi perubahan ke arah kesetaraan.

d. Dimensi Partisipasi

Partisipasi aktif perempuan diartikan bahwa pemerataan partisipasi perempuan dalam proses penetapan keputusan yaitu partisipasi dalam proses perencanaan penentuan kebijakan dan administrasi. Aspek ini sangat penting pada proyek pembangunan. Di sini partisipasi berarti keterlibatan atau keikutsertaan aktif sejak dalam penetapan kebutuhan, formulasi proyek, implementasi dan monitoring serta evaluasi. Partisipasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kuantitatif (beberapa perempuan dan laki-laki yang terlibat) dan kualitatif (menunjuk peranan lai-laki dan perempuan dalam pengambilan/ penetapan keputusan).

e. Dimensi Kuasa/ Kontrol

Kesenjangan gender di tingkat ini terlihat dari adanya hubungan kausa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa terjadi di tingkat rumah tangga, komunitas, dan tingkatan yang lebih luas lagi. Kesetaraan dalam kuasa berarti adanya kuasa yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, satu tidak mendominasi atau berada dalam posisi dominan atas lainnya. Artinya perempuan kekuasaan sebagaimana juga laki-laki, untuk mengubah kondisi posisi, masa depan diri dan komunitasnya. Kesetaraan dalam kuasa merupakan

Dipindai dengan CamScanner

prasyarat bagi terwujudnya kesetaraan gender dan keberdayaan dalam masyarakat yang sejahtera.

Tabel 3.7. Kerangka Analisis Longwe
Profil Gender dalam Program Pembangunan

Sektor	Proyek	Kesejah-teraan	Akses	Penyadaran	Partisi pasi	Kont rol
Pertanian						
Pendidikan DanPelatihan						
Industri						
Proyekmilik Perempuan						

Teknik Longwe mendasarkan pada pentingnya pembangunan bagi perempuan, bagaimana menangani isu gender sebagai kendala pemberdayaan perempuan dalam memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan upaya mencapai kesetaraan gender. 5 kriteria analisis yang dikemukakan Longwe dapat disusun dalam bentuk piramida:

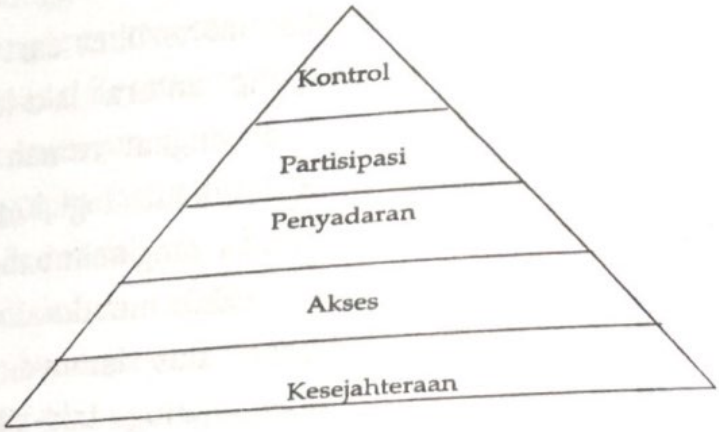

Dipindai dengan CamScanner

4. *GAP (Gender Analysis Pathway)*

Teknik ini biasanya digunakan untuk menilai suatu kebijakan apakah sudah sesuai dengan criteria atau belum. Kriteria ini menjadi panduan sangat rinci.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

Tahap I: Analisis Kebijakan yang responsif gender. Pada tahap ini terdapat 4 langkah yang harus dilakukan yaitu:

- Langkah 1: Identifikasi tujuan atau sasaran kebijakan/program kegiatan pembangunan Saat ini.
- Langkah 2: Sajikan data kuantitatif dan atau kualitatif yang terpilah menurut jenis Kelamin. (Sajikan data pilah, format lihat BAB IIII)
- Langkah 3: Analisis sumber terjadinya faktor-faktor terjadinya kesenjangan gender
- Langkah 4: Identifikasi masalah-masalah gender.

Tahap II. Formulasi Kebijakan Responsif Gender. Pada tahap harus dilakukan formulasi kebijakan responsif gender yang terbagi menjadi 2 langkah:

- Langkah 5: Rumuskan kembali kebijakan pembangunan yang responsif gender
- Langkah 6: Identifikasi indikator gender.
- Tahap III: Rencana Aksi yang reponsif gender. Pada tahap ini terbagi menjdi 2 langkah:
- Langkah 7: Penyusunan Rencana Aksi
- Langkah 8 Identifikasi sasaran untuk setiap rencana aksi.

Untuk mengidentifikasi yaitu metode GAP (*Gender Analysis Pathway*), yang menganalisa situasi sosial dengan

Dipindai dengan CamScanner

melihat akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diterima mahasiswa laki-laki maupun perempuan.

Dengan menggunakan metode GAP, maka disini akan diuraikan situasi tentang: 1) Keaktifan Mahasiswa laki-laki dan perempuan pada pembelajaran PKn; dan 2) Akses yang diberikan dosen kepada mahasiswa laki-laki dan perempuan.

1) Keaktifan Mahasiswa pada Pembelajaran PKn

Keaktifan mahasiswa dilihat dari dua hal, yaitu: 1) Kehadiran; dan 2) Partisipasi di dalam kelas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa kahadiran mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama tinggi. Hal tersebut dikarenakan mereka menempuh mata kuliah PKn pada semester pertama, sehingga kepatuhan mereka sangat tinggi. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu mahasiswa laki-laki berikut ini:

> "Kalau tidak masuk tanpa alasan yang jelas, ya...tidak berani bu. Teman-teman semua masuk. Apalagi dosennya selalu mengabsen, katanya juga menjadi faktor penentu nilai. Jadi, meski masuk jam enam pagi saya selalu berusaha tetap masuk".[23]

Terkait dengan partisipasi mahasiswa PKn di kelas, berdasar hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa ada sebagian kelas dimana mahasiswa laki-laki lebih aktif, tetapi sebagian kelas mahasiswa perempuannya yang lebih aktif. Hal tersebut dipaparkan oleh Ibu A berikut ini:

---

[23] Hasil wawancara dengan C, mahasiswa Tarbiyah kelas PKn, 3 September 2012

Dipindai dengan CamScanner

"Beberapa kelas yang saya pegang, yang lebih aktif laki-laki. Tapi, ada juga yang aktif perempuan. Penyebab keaktifan atau tidak bukan karena jenis kelaminya. Tapi lebih karena kapasitasnya. Mahasiswa perempuan yang tidak aktif bukan karena mereka merasa *second class*, tetapi karena kurang menguasai materi". [24]

Ibu P pun menyatakan hal yang senada bahwa ada sebagaian kelas yang mahasiswa laki-lakinya aktif dan ada juga mahasiswa perempuanya yang aktif. Berikut ini hasil wawancaranya:

"Kalau masalah keaktifan itu beda-beda. Ada kelas yang mahasiswa perempuanya lebih aktif, ada juga yang mahasiswa laki-lakinya lebih aktif. Tapi kalau saya lihat, perempuan kalau aktif itu sendirian. Tidak bisa menyebarkan virusnya ke yang lain. Kalau laki-laki itu soliditasnya tinggi. Cenderung mengajak teman lainya aktif juga.[25]

Dua pernyataan di atas, mengisyaratkan seolah-olah jenis kelamin laki-laki perempuan tidak mempengaruhi aktif tidaknya, namun, penulis meragukannya, dan guna mengetahui lebih dalam mengenai faktor penyebab ketidakaktifan mahasiswa perempuan (yang menurut informasi dari Ibu A tidak disebabkan oleh perasaan *second class)*, maka penulis melakukan *cross check* melalui *Forum Group Discussion* (FGD) dengan mengundang mahasiswa

[24] Hasil wawancara dengan Ibu A, tanggal 24 Agustus 2012
[25] Hasil wawancara dengan Ibu P, 4 September 2012

Dipindai dengan CamScanner

laki-laki dan perempuan yang kurang aktif, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 3.8

Identifikasi Faktor Penyebab Ketidakaktifan Mahasiswa pada Pembelajaran PKn

Jenis Kelamin	Identifikasi Permasalahan	Faktor Penyebab
Laki-laki	Kurang menguasai materi	Malas
		Tidak tertarik, cuex
Perempuan	Kurang menguasai materi	Belum membaca
		Tidak sempat membaca
	Takut menyatakan pendapat	Tidak biasa bicara di depan umum
		Takut bicara di depan umum
		Suara tidak bisa keras

Tabel di atas menunjukkan bahwa perempuan memiliki problem ganda, antara lain kurangnya penguasaan terhadap materi dan ketidakberanian mengemukakan pendapat di depan banyak orang. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor antara lain: kesempatan yang dimilikinya untuk membaca sangat kurang, tidak biasa bicara di depan umum, dan takut bicara di depan umum, serta suara yang tidak bisa keras alias pelan. Hal ini menurut ibu P disebabkan oleh latar belakang yang sangat patriarkhi, "Mereka dengan latar belakangnya yang berasal dari

Dipindai dengan CamScanner

masyarakat desa yang sangat patriarkhi sangat mempengaruhi pola pikir dan jawaban-jawaban mereka".[26]

2. Akses Mahasiswa laki-laki dan perempuan

Akses disini dimaknai sebagai kesempatan yang diberikan dosen kepada mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen PKn yang memiliki perspektif gender, maka dapat dikatakan bahwa akses yang diberikan dosen kepada mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan dalam hal pembagian peran, sumber belajar, penggunaan media, adalah sama. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu A, sebagai berikut:

> "Akses yang sama selalu saya berikan kepada mahasiswa laki-laki maupun perempuan. Bahkan, secara umum saya selalu menekankan kepada mereka bahwa di STAIN ini pada umumnya tidak ada perbedaan bagi laki-laki maupun perempuan. Bayar SPP tidak ada bedanya, kelas tidak dibedakan, tidak ada kelas khusus laki-laki, maupun perempuan, hak dan kewajiban juga sama, maka baik laki-laki maupun perempuan harus bisa mengambil manfaat yang sama pula. Termasuk manfaat dalam perkuliahan. Kemudian, terkait dengan pembelajaran PKN yang saya ampu, saya juga selalu memberikan akses yang sama. contoh, pada saat menggunakan metode *role play* maka saya berusaha melibatkan mahasiswa laki-laki dan perempuan secara seimbang. Dengan demikian, yang tadinya mahasiswa perempuan malu-malu untuk mengambil peran, dengan pembagian yang secara seimbang saya lakukan, maka mereka

[26] Hasil wawancara dengan Ibu P, 4 September 2012

Dipindai dengan CamScanner

terlibat. Itu salah satu usaha saya agar mereka tidak tertinggal".[27]

Senada dengan hasil wawancara di atas, Ibu P, juga memberikan akses yang sama kepada mahasiswa laki-laki dan perempuan. bahkan pada kasus tertentu, justru banyak perempuan yang dilibatkan. Berikut hasil wawancaranya:

> "Pada saat membincang materi warga negara yang didalamnya terdapat pembahasan tentang issue-issue kesetaraan terhadap perempuan, maka mahasiswi perempuan lebih banyak saya support untuk terlibat. Contoh, sebagai nara sumber, mencari sumber, masuk ke dalam kelompok pro dan kontra, dan lainya. Begitu juga pada saat materi tentang HAM, demokrasi, dan civil society. Mahasiswi betul-betul saya berikan kesempatan lebih untuk berpartisipasi, mengingat perempuan sangat dekat dengan persoalan yang terkait dengan tema-tema tersebut. Contoh pelanggaran HAM dalam rumah tangga atau yang terkenal dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), minimnya partisipasi perempuan dalam politik, serta pembangunan".[28]

Apa yang disampaikan oleh kedua nara sumber di atas, kemudian penulis cek dengan melakukan triangulasi teknik, yaitu dengan metode observasi di dalam kelas, dan triangulasi sumber, yaitu wawancara dengan mahasiswa.

Berdasarkan observasi di dalam kelas, ditemukan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan

---

[27] Wawancara dengan Ibu A, dosen PKn, 24 Agustus 2012

[28] Hasil wawancara dengan Ibu P, Dosen PKn, 4 September 2012

Dipindai dengan CamScanner

kedua nara sumber di atas, dimana mahasiswi perempuan selalu didorong untuk selalu berpartisipasi. Hal tersebut dimulai pada saat pertemuan pertama, yaitu perkenalan. Ibu P meminta mahasiswi dan mahasiswa maju ke depan memperkenalkan diri. Kemudian, pada saat materi identitas nasional, diawali dengan definisi identitas. laki-laki dan perempuan pun diminta maju, kemudian teman lainya diminta mengidentifikasi ciri-ciri laki-laki dan perempuan.

Berikut salah satu hasil pengidentifikasian laki-laki dan perempuan pada beberapa kelas yang diampu oleh Ibu P.

Tabel 3.9

Identifikasi Perbedaan Laki-laki & Perempuan

Laki-laki	Perempuan
Kuat	Lemah
Rasional	Perasaan
Jakun	Payudara
Penis	Vagina
Rambut pendek	Rambut panjang
Mimpi basah	Menstruasi
Tdk bisa hamil	Hamil

Sumber: Hasil observasi, 2 September 2012

Setelah ditemukan perbedaan laki-laki dan perempuan seperti di atas, lalu ditanyakan identitas yang bisa dipertukarkan dan tidak bisa dipertukarkan. Identitas yang bisa ditukar, namanya gender, yaitu jenis kelamin sosial yang merupakan konstruksi masyarakat, dan bisa mengalami perubahan. Contohnya, identitas kuat dan lemah. Laki-laki juga bisa lemah, dan perempuan bisa kuat. Sedangkan identitas yang tidak bisa dipertukarkan disebut dengan sex,

Dipindai dengan CamScanner

yaitu jenis kelamin biologis yang secara *given* datang dari Allah SWT atau yang disebut dengan kodrat. Contoh, jakun dan payudara, tidak ada laki-laki yang payudaranya berfungsi, sementara tidak ada perempuan yang memiliki jakun.

Pembedaan jenis kelamin biologis dan jenis kelamin sosial di atas senada dengan yang ditulis oleh Robert Stoller (1968) yang memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisain yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Selain Robert Stoller, Ann Oakley (1972) mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.[29]

Menurut Mansoue Fakih, perbedaan gender dan seks dapat dilihat dari aspek sumber, unsur pembeda, visi dan misi, sifat, dampak dan keberlakuan seperti yang tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10 Perbedaan Seks dan Gender

Karakteristik	Seks	Gender
Sumber pembeda	Tuhan	Manusia/ masyarakat
Unsur Pembeda	Biologis (alat reproduksi)	Kebiasaan/ kebudayaan
Sifat	Kodrat dan tidak dapat dipertukarkan	Harkat, martabat, dan dapat dipertukarkan
Dampak	Terciptanya nilai-	Terciptanya

[29] Mansour Fakih, *Analisis Gender & transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 7

Dipindai dengan CamScanner

	nilai kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian sehingga menguntungkan kedua belah pihak	norma-norma tentang pantas atau tidaknya dan sering merugikan salah satu pihak
Keberlakuan	Sepanjang masa, dimana saja tidak memandang kelas	Dapat berubah dan berbeda antar kelas

Sumber: Mansour Fakih, *ibid*, hlm 16-17.

Setelah memahami perbedaan gender dan sex, maka Ibu P berpesan, kalau diminta untuk membedakan laki-laki dan perempuan itu disebutkan perbedaan sex saja atau yang tidak bisa dipertukarkan di antara keduanya. Sebab, kalau gender atau identitas yang dikonstruksi masyarakat, di tempat satu dengan lainya akan berbeda. Ada masyarakat yang justru perempuanya lebih kuat dibanding laki-lakinya. Lebih lanjut, Ibu P menjelaskan bahwa identitas (gender) laki-laki dan perempuan di atas tidak masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Masalahnya di banyak tempat, akibat konstruksi masyarakat atas laki-laki dan perempuan di atas, membuat salah satu jenis kelamin atau dua-duanya mengalami ketidakadilan. Contoh, karena dikonstruksi bahwa laki-laki itu kuat, maka laki-laki tidak diijinkan untuk cengeng, menangis, dan sejenisnya. Ketika ada anak laki-laki bermain, kemudian terjatuh dan menangis, maka kata-kata yang biasanya keluar dari ibunya, maupun orang lain adalah: "Lho..anak laki-laki koq menangis, tidak pantas itu". Sebaliknya, jika ada anak perempuan yang jatuh tetapi tidak menangis, malah banyak yang terheran-heran.

Dipindai dengan CamScanner

Manifestasi ketidakadilan gender oleh Mansour Fakih diklasifikasi seperti di bawah ini: *pertama,* marginalisasi perempuan. Mislanya, program swasembada pangan atau revolusi hijau (*green revolution*) secara ekonomi telah menyingkirkan kaum perempaun dari pekerjaannya sehingga memiskinkan mereka. Di jawa misalnya, program revolusi hijau dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak memungkinkan lagi permanen dengan ani-ani, padahal alat tersebut melekat dan dgunakan oleh kaum perempuan. Akibatnya banyak kaum perempuan miskin di desa termarginalisasi, yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan di sawah pada musim panen berarti program revolusi hijau dirancang tanpa mempertimbangkan aspek gender.

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi ditempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak diantara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris setenah dari hak waris laki-lai terhadap kaum perempuan.

Kedua, Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan sobordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat

Dipindai dengan CamScanner

munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan, perempuan pernah memiliki peraturan jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktek seperti itu sesungguhnya berangkat dai kesadaran gender yang tidak ada.

Ketiga, S***tereotipe.*** Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celakanya *stereotipe* selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (*stereotipe*) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, perempuan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialamioleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. *Stereotipe* ini berakibat wajar sekali jika pendidikan

Dipindai dengan CamScanner

kaum perempuan di nomorduakan. *Stereotipe* terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana. Banyak peraturan perempuan, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut.

Keempat, Kekerasan (*violence)* adalah serangan atau invasi (*assault)* terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related violence.* Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya: pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*), bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan, kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*), kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana (*enforced sterilization*), kekerasan terselebung (molestation), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan pelbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.

Kelima, beban kerja. Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk

Dipindai dengan CamScanner

menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara anak. Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempun tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda.

Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang di anggap masyarakat sebagai jenis "pekerjaan perempuan", seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai "pekerjaan laki-laki" serta dikategorikan "bukan produktif" sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi Negara. Sementara itu, kaum perempuan, karena dianggap gender ini, sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak kaum laki-laki diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaa domestik itu kesemuanya itu telah memperkuat pelanggengan secara kultural dan sruktural beban kerja kaum perempuan.

Berbeda dengan dua informan di atas, berikut ini adalah dosen-dosen pengampu mata kuliah PKn yang netral gender dalam pengajaranya, khususnya dalam pemberian akses kepada mahasiswa. Netral gender artinya tidak melihat jenis kelamin, kebutuhan spesifik, dan pengalaman khusus laki-laki maupun perempuan. sebagaimana diuangkapkan Ibu C berikut ini:

> "Saya tidak pernah membeda-bedakan mahasiswa laki-laki maupun perempuan. Kalau saya bedakan

Dipindai dengan CamScanner

nanti dikatakan tidak adil. Jadi, saya selalu memberikan kesempatan yang sama. saya tawarkan kesempatan kepada siapapun yang mau berpartisipasi".[30]

Kemudian, penulis mencoba mengobservasi kelas yang diampu oleh Ibu D, hasilnya banyak mahasiswa laki-laki yang lebih berpartisipasi dibandingkan dengan mahasiswa perempuan. Kondisi yang sama juga penulis temui pada kelas yang diampu oleh Bapak E, dimana mahasiswa laki-laki lebih responsif terhadap tawaran-tawaran dosen untuk maju, untuk menjawab, dan memenuhi tugas-tugas lainya.

Ida Ruwaida Noor menyatakan bahwa rendahnya status dan posisi perempuan dilatarbelakangi oleh:[31] *Pertama*, faktor kultural, yakni sebagai hasil adanya praktek-praktek sosial yang didasari sikap mental (*stereotype*) yang cenderung menyudutkan perempuan. Misalnya anggapan bahwa kedudukan pria lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sikap ini diperkuat oleh sistem norma dan nilai yang dirujuk masyarakat baik yang bersumber pada agama, adat maupun budaya. *Kedua*, faktor struktural, bahwa lemahnya status dan posisi perempuan secara formal diabsahkan melalui berbagai kebijakan (negara), baik yang umum maupun khusus ditujukan kepada kaum perempuan dalam hal ini kebijakan dosen yang mengampu pembelajaran.

---

[30] Hasil wawancara dengan Ibu C, 5 September 2012

[31] Ida Ruwaida Noor, 'Agenda Demokratisasi oleh dan untuk Perempuan', dalam *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Volume 1 No. 1, Mei-agustus 2000.

Dipindai dengan CamScanner

3. Materi atau bahan ajar PKn netral gender

Berdasarkan pada hasil analisa materi PKn di STAIN Kudus dan hasil wawancara dengan informan yang memiliki perspektif gender, maka dapat dikatakan bahwa materi PKn netral gender, tetapi potensial menjadi bias gender kalau dosen pengampu atau yang menyampaikan materi tersebut tidak memiliki perspektif gender, sebagaimana diungkapkan oleh ibu P berikut ini:

> "Menurut saya, bahan ajar PKN khususnya yang bersumber dari ICCE UIN netral gender alias tidak ada yang bias. Meski secara tersurat tidak ada materi tentang kesetaraan gender, tetapi secara tersirat ada pada materi Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, warga negara, dan juga konstitusi".[32]

Materi yang netral gender menurut Ibu A justru potensial sekali terjadinya bias gender, sebab jika dilihat latar belakang dosen tidak semua memiliki perspektif gender. Lebih jelas, pada hasil wawancara berikut ini:

> ".....Namun, materi-materi di atas memang bisa bias gender kalau dosen yang menyampaikanya *background*-nya bias. Contoh, tentang materi hak dan kewajiban sebagai warga Negara diantaranya adalah partisipasi dalam pembangunan. Kalau dosennya tidak memiliki perspektif gender, maka bentuk-bentuk partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan hanya seputar urusan domestik. Sedangkan partisipasi politik dianggap bukan wilayah perempuan. kalau penjelasanya seperti itu, maka pada akhirnya pasti banyak mahasiswa perempuan

[32] Hasil wawancara dengan Ibu P, 4 september 2012

Dipindai dengan CamScanner

yang enggan mengikuti kegiatan-kegiatan politik baik selama menjadi mahasiswa maupun setelah lulus".[33]

Dari uraian di atas, maka dapat dibuat matrik yang berisi identifikasi masalah gender pada pembelajaran PKn di STAIN Kudus tahun akademik 2012/2013 berikut ini:

Tabel 3.11
Matrik Identifikasi Masalah pada Pembelajaran PKn di STAIN Kudus

No	Identifikasi masalah pada pembelajaran PKn	Faktor Penyebab
1.	Keaktifan mahasiswa perempuan lebih rendah dibandingkan mahasiswa laki-laki	• Kesempatan yang minim bagi mahasiswi perempuan untuk membaca di rumah sehingga penguasaan materi kurang
		• Takut berbicara di depan umum karena tidak biasa bicara di depan umum
		• Suara perempuan pelan.
2.	Ada sebagian dosen yang dalam pembelajaran memberikan akses yang lebih kepada mahasiswa laki-laki	• Dosen belum memiliki pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender atau belum responsive gender

[33] Hasil wawancara dengan Ibu A, 24 Agustus 2012

Dipindai dengan CamScanner

	dibanding mahasiswa perempuan.	
	Ada sebagian dosen yang netral gender dalam memberikan akses pada saat pembelajaran PKn, dan dalam pelaksanaanya cenderung bias gender	
3.	Sebagian besar materi PKn netral gender dan potensial menjadi bias gender	Dosen pengampu tidak memiliki latar belakang pemahaman gender

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Permasalahan gender yang terjadi pada pembelajaran PKn di STAIN Kudus Tahun Akademik 2012/2013 adalah sebagai berikut: 1) Keaktifan mahasiswa perempuan lebih rendah dibandingkan mahasiswa laki-laki; 2) Ada sebagian dosen yang dalam pembelajaran memberikan akses yang lebih kepada mahasiswa laki-laki dibanding mahasiswa perempuan; 3) Ada sebagian dosen yang netral gender dalam memberikan akses pada saat pembelajaran PKn, dan dalam pelaksanaanya cenderung bias gender; 4) Sebagian besar materi PKn netral gender namun potensi menjadi bias gender.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA PEMBELAJARAN PKn DI STAIN KUDUS

Permasalahan gender yang terjadi pada pembelajaran PKn di STAIN Kudus Tahun Akademik 2012/2013 adalah sebagai berikut: 1) Keaktifan mahasiswa perempuan lebih rendah dibandingkan mahasiswa laki-laki; 2) Ada sebagian dosen yang dalam pembelajaran memberikan akses yang lebih kepada mahasiswa laki-laki dibanding mahasiswa perempuan; 3) Ada sebagian dosen yang netral gender dalam memberikan akses pada saat pembelajaran PKn, dan dalam pelaksanaanya cenderung bias gender; 4) Sebagian besar materi PKn netral gender namun potensi menjadi bias gender.

A. Kebutuhan Gender pada Pembelajaran PKn

Setelah ditemukenali persoalan atau permasalahan gender yang terjadi pada pembelajaran PKN, berikutnya akan dipaparkan mengenai kebutuhan gender yang diperlukan pada pembelajaran PKn. Dengan terumuskannya kebutuhan gender ini maka bisa dijadikan sebagai pijakan untuk melaksanakan aksi atau perbaikan guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Dipindai dengan CamScanner

Pertama, dibutuhkan adanya pelatihan gender baik bagi mahasiswa maupun bagi dosen pengampu PKN. Sebagaimana disampaikan Ibu A berikut ini:

> "..... Makanya butuh adanya pelatihan gender bagi dosen PKN. Meski itu tidak menjamin akan merubah cara pandang mereka secara cepat, tapi minimal ada usaha untuk bagaimana mereka mengenali bahwa mahasiswa laki-laki dan perempuan itu memiliki pengalaman, cara, dan kebutuhan yang berbeda dalam pembelajaran. Dan, pelatihan ini harus dilaksanakan secara regular atau terus menerus, karena materi gender juga luas".[1]

Ungkapan senada juga disampaikan oleh Ibu P, sebagai berikut: "Kebutuhan mendesak menurut saya adalah segera diadakanya *s*osialisasi kesetaraan gender bagi dosen karena banyak dosen yang belum 'Welcome' terhadap gerakan kesetaraan gender".

Menurut Robert M.Z. Lawang pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman seseorang dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan disebut dengan *human capital* yang melatarbelakangi perilaku seseorang.[2]

Kedua, adanya bahan ajar Pkn yang secara eksplisit memuat tentang materi gender, dan secara integral menjadi ruh semua materi PKn, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu P sebagai berikut;

> ".....dibutuhkan materi PKN yang khusus dan secara eksplisit ada tentang wacana kesetaraan gender.

---

[1] Hasil wawancara dengan Ibu A, 24 Agustus 2012

[2] Robert M.Z. Lawang, *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik: Suatu* Pengantar, Jakarta: FISIP UI Press, 2004, hlm. 10

Dipindai dengan CamScanner

Tidak hanya implisit pada materi HAM dan demokrasi, tetapi secara jelas ada pada bab maupun sub bab. Dengan demikian, meskipun dosen yang mengampu tidak memiliki perspektif gender, materi tentang kesetaraan gender tetap akan disampaikan".

Jika dua hal di atas terwujud, maka pembelajaran responsif gender yaitu pembelajaran yang mengakui dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, minat, dan pengalaman belajar murid perempuan dan laki-laki yang disebabkan oleh konstruksi gender pada lingkunganya akan terlaksana. Dan, tujuan agar terciptanya kesetaraan gender pun terwujud.

Dari uraian di atas, maka kebutuhan gender yang berhasil diidentifikasi pada pembelajaran PKn di STAIN Kudus Tahun Akademik 2012/2013 yaitu:

1. Pelatihan gender bagi mahasiswa; dan
2. Pelatihan pembelajaran berwawasan gender bagi dosen pengampu PKn di STAIN Kudus;
3. Disusunya bahan ajar Pkn yang secara eksplisit memuat tentang materi gender, dan secara integral menjadi ruh semua materi PKn.

B. Sekilas tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)

Perhatian dunia internasional terhadap persoalan gender sangat tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui serangkaian konferensi khusus tentang perempuan yang diselenggarakan di Mexico City (1978), Kopenhagen (1980), Nairobi (1985), Beijing (1995), dan di New York (2000). Selain itu, juga dibentuk sebuah komite yang menangani *Convention on The*

Dipindai dengan CamScanner

Elimination of All forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) sebagai kelanjutan dari konferensi HAM yang diselenggarakan di Wina. Konferensi tersebut telah menghasilkan rencana aksi yang menjadi barometer keberhasilan upaya memajukan perempuan negara-negara peserta, termasuk Negara Indonesia.

Di Indonesia, wacana penguatan keadilan dan kesetaraan gender secara substantif terkandung dalam UUD 1945. Beberapa payung hukum yang telah dihasilkan di antaranya: UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; SK menaker Nomor 04 Tahun 1988 tentang larangan PHK bagi perempuan kawin, hamil, dan melahirkan; UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; dan di Tahun 2012 ini juga digagas rancangan Undang-undang Kesetaraan gender.; UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak; UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan; UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Selain itu, pembentukan kementerian khusus untuk perempuan pada Tahun 1983 merupakan suatu bentuk komitmen nyata bahwa Indonesia merupakan negara yang *concern* terhadap penguatan perempuan sebagai implementasi dari penghormatan hak asasi manusia.

1. Pengertian Pengarusutamaan Gender (PUG)

PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman,

Dipindai dengan CamScanner

aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan pembangunan (Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000).

PUG sebagai salah satu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, harus dapat membuktikan bahwa aspek gender benar-benar tercermin dan terpadu dalam empat fungsi utama manajemen program setiap instansi, lembaga, maupun organisasi, yaitu:

a. Perencanaan; menyusun pernyataan atau tujuan yang jelas bagi perempuan dan laki-laki;
b. Pelaksanaan; memastikan bahwa strategi yang dijelaskan mempunyai dampak pada perempuan dan laki-laki.
c. Pemantauan; mengukur kemajuan dalam pelaksanaan program dalam hal partisipasi dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.
d. Penilaian; memastikan bahwa status perempuan maupun laki-laki sudah menjadi lebih setara/ seimbang sebagai hasil prakarsa tersebut.

2. Tujuan PUG

Tujuan PUG sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

a. Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsive gender.
b. Memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami marjinalisasi, sebagai dampak dari bias gender.
c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga mau

Dipindai dengan CamScanner

melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang masing-masing.

3. PUG sebagai strategi

a. Ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan menuntut revisi atas pendekatan yang digunakan. Gender and Development (GAD) adalah satu pendekatan mendasar pada asumsi bahwa ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan disebabkan oleh pola relasi (yang tidak seimbang) antara laki-laki dan perempuan yang hidup dalam masyarakat patriarkhi yang kemudian termanifestasi dalam berbagai kebijakan/ program/ kegiatan yang dibuat para pengambil keputusan. *Gender mainstreaming* sendiri ialah strategi untuk mengarusutamakan perspektif gender dalam pembangunan.

b. *Gender mainstreaming* merupakan terobosan pemikiran terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sudah ada. Salah satu manfaat terbesar adalah kenyataan penekanan pada pengarusutamaan gender memperlihatkan secara jelas bahwa kesetaraan gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bukanlah hal sederhana hanya mengenai masalah perempuan yang dapat ditanggulangi dengan memasukan secara khusus di satu sisi saja melainkan suatu masalah social yang penting yang akan berimplikasi kepada seluruh pembangunan.

c. Dasar hokum untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender secara efektif, pemerintah

Dipindai dengan CamScanner

mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan sebagai penjabaran Undang-undang nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas.

d. Guna mengimplementasikan Inpres No. 9 Tahun 2000 harus disediakan *Gender Based Analysis* (GBA) yang digunakan sebagai dasar pembuatan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian akan terwujud perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang berwawasan gender (*gender responsive development*).

C. PUG Bidang Pendidikan

Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Pendidikan sudah memiliki "payung hukum" yang jelas seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Selain itu, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) juga sudah menjadikan kesetaraan gender sebagai salah satu ranah yang perlu dijadikan sebagai acuan operasional penyusunan kurikulum. Ini artinya, dari sisi legal-formal, PUG bidang Pendidikan tak perlu disangsikan lagi untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas.

Namun, secara jujur harus diakui, implementasi PUG dalam proses pembelajaran masih terkendala banyak faktor. Selain kultur masyarakat kita sudah demikian lama dicengkeram oleh kokohnya budaya patriarki yang

Dipindai dengan CamScanner

memandang kaum perempuan sebagai "makhluk kelas dua", dukungan anggaran dan fasilitas sekolah yang memberikan ruang gerak yang memadai terhadap implementasi PUG bidang pendidikan juga belum berlangsung seperti yang diharapkan. Dalam konteks demikian, sangat beralasan kalau implementasinya dalam proses pembelajaran di kelas belum bisa berlangsung mulus dan kondusif.

Meski demikian, tidak lantas berarti PUG bidang pendidikan gagal teraplikasikan. Untuk melepaskan kuatnya mitos dan akar patriarki yang melilit kultur masyarakat kita memang membutuhkan proses dan tahapan yang cukup lama. Sejak dini, anak-anak yang kini tengah gencar memburu ilmu di bangku pendidikan, mulai TK, SD, SMP, hingga SMA/MA/SMK, bahkan perguruan tinggi perlu diubah *mind-set*-nya tentang keadilan dan kesetaraan gender. Secara bertahap, anak-anak masa depan negeri ini perlu diperkenalkan dan diajak untuk berpikir kritis dan visioner dalam memandang posisi dan peran kaum perempuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jangan sampai terjadi, anak-anak yang notabene menjadi pewaris sah masa depan negeri ini masih terus dihinggapi mitos "serba laki-laki" sehingga peran kaum perempuan makin terpinggirkan.

Salah satu strategi yang tepat untuk memperkenalkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender adalah melalui proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Jika dilakukan secara simultan dan berkelanjutan, perubahan *mind-set* anak-anak akan terus berlangsung dari generasi ke generasi, hingga akhirnya pada kurun waktu beberapa tahun mendatang, mitos dan kultur patrarkhi akan bisa terbebaskan. Peran dan posisi kaum perempuan di ranah publik juga makin diakui, hingga tak muncul lagi peristiwa

Dipindai dengan CamScanner

bias gender, baik dalam bentuk marginalisasi (peminggiran), double burden (peran ganda), kekerasan (*violence*), *stereo-type* (citra baku/pelabelan), maupun subordinasi (penomorduaan) yang menimpa kaum perempuan.

D. Menuju Pendidikan Berwawasan Gender (PWG)

Kesetaraan gender pada hakikatnya merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah mencanangkan pendidikan untuk semua (education for all), yang memosisikan anak perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama dalam memperoleh pendidikan. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan tiga "payung hukum" yang diharapkan bisa dijadikan sebagai acuan pihak-pihak terkait untuk mengimplementasikannya, yakni: (1) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

Namun, harus diakui, bukan hal yang mudah untuk mengakselerasi proses perwujudan kesetaraan gender di tengah kultur patriarki yang masih kukuh mencengkeram sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

Dipindai dengan CamScanner

bernegara. Masih banyak "resistensi" yang muncul dari kalangan tertentu, sehingga proses implementasinya menghadapi banyak tantangan. Bahkan, secara tidak langsung, institusi pendidikan yang seharusnya mampu menjadi "agen budaya" untuk menumbuhkan nilai keadilan dan kesetaraan gender kepada peserta didik, justru tak jarang mengukuhkan mitos bias gender itu melalui berbagai bentuk.

Hasil penelitian dan hasil analisis pengkajian bahan ajar yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) dan Departemen Pendidikan Nasional/ Dinas Pendidikan Daerah bekerjasama dengan para peneliti dari Pusat Studi Wanita. Salah satu bukti bahwa bahan ajar maupun buku pelajaran masih mengandung muatan bias gender itu dapat dilihat dalam buku-buku PPKn kelas I, II, III tingkat SD dan SMP, IPS kelas I, II, III tingkat SD dan SMP, dan buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas I, II, III tingkat SD dan SMP. Contoh-contoh kalimat dan ilustrasi, seperti: (1) Dian mau ke pasar bersama ibu; (2) Tante Nur bekerja di Rumah Sakit sebagai perawat; (3) Ibu membuat bubur; (4) Kegiatan perempuan membuat kue; (5) Ibu menyapu kamar tidur dan ruang; (6) Ibu memasak lauk dan sayur untuk sekeluarga; Andi senang bermain bola, Dina senang main boneka; (7) Ibu pergi ke pasar, ayah berangkat ke kantor; masih sering ditemukan dalam buku ajar yang digunakan di lingkungan institusi pendidikan kita.

Selain itu, para guru yang seharusnya menjadi "patron" teladan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, tak jarang melontarkan ungkapan verbal yang mengukuhkan bias gender itu sendiri ketika menangani

Dipindai dengan CamScanner

anak-anak yang diduga sedang terlibat dalam penyimpangan perilaku.

Sekadar contoh, coba perhatikan ungkapan-ungkapan verbal berikut ini.

- Kamu itu anak perempuan, kenapa suka ngomong kasar dan tidak sopan?
- He, kamu itu anak laki-laki, kenapa jadi cengeng begitu?
- Sebagai anak laki-laki, kamu harus belajar tanggung jawab dan mandiri!
- Jadi anak perempuan itu tidak boleh nakal, ya?
- Jika dicermati, ungkapan-ungkapan verbal tersebut memiliki maksud tersirat seperti berikut ini.
- Anak laki-laki boleh ngomong kasar dan tidak sopan.
- Cengeng hanya menjadi label anak perempuan.
- Anak perempuan tidak perlu belajar tanggung jawab dan mandiri.

Padahal, sesungguhnya sang guru tak bermaksud untuk mengaitkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh peserta didiknya dengan persoalan-persoalan gender. Namun, lantaran proses stereotipe dan pelabelan sosial berdasarkan jenis kelamin yang berlangsung dalam kurun waktu yang begitu lama, secara tidak sadar guru selama ini telah ikut berperan besar dalam melanggengkan nilai-nilai patriarki yang memosisikan perempuan sebagai pihak yang ter-subordinasi.

Guru memang tidak salah memberikan teguran kepada siswa yang bermasalah dengan ungkapan-ungkapan semacam itu. Namun, dalam perspektif gender, ungkapan-ungkapan semacam itu, tak hanya "melukai" batin si anak, tetapi juga memberikan kesan yang kuat terhadap

Dipindai dengan CamScanner

perbedaan status dan peran antara anak laki-laki dan perempuan. Bisa jadi, maksud tuturan di balik ungkapan itu akan terus dikenang hingga kelak mereka dewasa, untuk selanjutnya melanggengkan ungkapan-ungkapan semacam itu kepada anak keturunannya. Entah, sudah berapa generasi ungkapan-ungkapan verbal semacam itu terus menggema dari balik tembok sekolah, sehingga secara tidak langsung dunia persekolahan kita telah mengukuhkan bias gender dari generasi ke generasi. Hal-hal yang berkaitan dengan emosi dan perilaku bukanlah kodrat laki-laki maupun perempuan. Secara universal, karakter nakal, ngomong kasar, tidak sopan, cengeng, tanggung jawab, mandiri, dan semacamnya bisa dimiliki oleh siapa pun terlepas dari jenis kelaminnya.

Kita berharap, dunia pendidikan kita benar-benar sanggup menjalankan perannya sebagai "agen budaya dan peradaban" yang mencerahkan dan mencerdaskan, sehingga kelak mampu melahirkan generasi masa depan yang cerdas, berkarakter, dan responsif gender. Perlu ada upaya serius dari para pendidik untuk meminimalkan ungkapan-ungkapan verbal yang bisa "melukai" batin anak yang sekaligus juga bisa mengukuhkan bias gender.

PWG adalah suatu lembaga pendidikan yang memperhatikan secara seimbang kebutuhan spesifik untuk anak laki-laki dan anak perempuan, pada aspek akademik, sosial, lingkungan fisik, dan partisipasi masyarakat.

Tujuan PWG adalah mewujudkan kesempatan pendidikan yang adil dan setara adil pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, mendorong peningkatan mutu dan efisiensi melalui pemberdayaan potensi perempuan dan laki-laki secara optimal, dan memperkecil ketimpangan

Dipindai dengan CamScanner

gender terutama pada jurusan/program studi dan bidang kejuruan.

PWG penting karena kebijakan lembaga pendidikan cenderung netral (beberapa bias) gender, yang berdampak terhadap tingkat pemerolehan manfaat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (laki-laki biasanya mendapatkan manfaat lebih tinggi dibandingkan perempuan), masih terdapat bahan ajar yang mengandung stereotipe gender yang menguatkan prilaku bias gender di masyarakat, perilaku guru yang belum sensitif gender, yang berdampak pada bentuk-bentuk prilaku yang bias gender, dan penataan sarana dan prasarana di sekolah yang belum memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki, serta keterwakilan anggota masyarakat dalam komite sekolah dan dewan pendidikan masih didominasi oleh laki-laki yang biasanya berasal dari kelompok kaya.

Adapun ruang lingkup PWG meliputi: 1) Manajemen sekolah, yang meliputi; Organisasi dan budaya sekolah, Sarana dan Prasarana, Administrasi Sekolah, Kebijakan dan Pengelolaan Sekolah; 2) Proses Pembelajaran; perencanaan pembelajaran, penyusunan bahan ajar, prilaku guru, dan metode/pendekatan dalam pembelajaran, evaluasi dalam pembelajaran; 3) Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan di sekolah.

Sasaran PBG adalah:

1. Manajer Sekolah (Kepala Sekolah)
2. Tenaga Pendidik (Guru) dan Kependidikan
3. *Stakeholders* pendidikan (Komite Sekolah, Penulis Bahan Ajar, Penerbit, Orangtua)
4. Peserta didik

Indikator sasaran tercapai atau belum, antara lain:

Dipindai dengan CamScanner

- Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama atau setara dalam mengendalikan sistem pendidikan di sekolah.
- Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama atau setara dalam membina, mengarahkan dan melaksanakan pelayanan pendidikan di sekolah dan dapat memperoleh manfaat yang sama dari kesempatan dan peran tersebut.
- Sekolah menghargai adanya karakter kerja, kesempatan dan tugas kultur yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tugas kedinasan.
- Data dan informasi yang digunakan oleh guru dan kepala sekolah terpilah antara laki-laki dan perempuan, dan digunakan untuk analisis pendidikan yang berpihak pada laki-laki dan perempuan secara seimbang.
- Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menempati jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional di sekolah, melakukan pengendalian terhadap program serta memperoleh manfaat yang sama.
- Sekolah memiliki sarana-parasarana yang dapat diakses oleh serta memenuhi kebutuhan khusus laki-laki dan perempuan, seperti: kamar mandi, lapangan olahraga, alat-alat olahraga, pakaian olahraga, kamar ganti, bangsa, dan lainya.

Sedangkan Pembelajaran Responsif Gender (PRG) Yaitu pembelajaran yang memasukkan dimensi keadilan dan kesetaraan gender pada:

1. Perencanaan/persiapan pembelajaran
2. Pelaksanaan/proses Pembelajaran
3. Evaluasi Pembelajaran

Dipindai dengan CamScanner

Indikator PRG adalah:

1. Memahami dan mengenal sifat anak laki-laki dan perempuan secara perorangan
2. Mengembangkan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah bagi laki-laki dan perempuan.
3. Ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik bagi anak laki-laki dan perempuan.
4. Manfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar yang menarik bagi laki-laki dan perempuan.
5. Umpan balik untuk meningkatkan kegiatan belajar murid laki-laki dan perempuan.

****

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PUSTAKA

Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Jakarta: PT Buku Kita, 2008

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Depag RI, *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, 2009

Dimyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999

Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010

Kelvin Seiver, *Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pembelajaran*, IRCIS, 2008

Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI & BPS, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2011*

Lilik Hamidah, 'Respon Komunitas Madrasah terhadap Upaya PUG dalam Pendidikan', dalam *Jurnal Studi Gender Indonesia*, vol. 2, No. 2, 2011

Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2009

Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, Bandung: Mizan, 1999

Raymond J. Wlodkowski dan Judith H. Jaynes, *Hasrat Untuk Belajar (Membantu Anak-Anak Termotivasi dan Mencintai Belajar)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

Dipindai dengan CamScanner

Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik*,, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008a

Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaanya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008b

Robert M.Z. Lawang, *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik: Suatu* Pengantar, Jakarta: FISIP UI Press, 2004

Simone De Beauvoir, *The Second Sex Kehidupan Perempuan*, diterjemahkan oleh Toni B. Febriantono, dkk, Pustaka Prometea, 2003

Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Tri Marheini Pujiastuti, 'Metodologi Penelitian Berpespektif Gender', dalam *Jurnal Studi Gender Palastren*, Vol 2 No. 1, 2009

Tim ICCE, *Civic Education*: *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan The Asia Foundation., 2003

WJS Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1984

Sumber lain:

Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

Jurnal Perempuan, Edisi 50

Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 2008

http://agungborn91.wordpress.c

www.stainkudus.ac.id

Dipindai dengan CamScanner

TENTANG PENULIS

Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si lahir di Kudus, pada 26 Juni 1977. Pendidikan dasar dan menengah ditempuhnya di Kudus. Pendidikan dasar di MI Miftahut Tholibin Mejobo (1983-1989) merangkap belajar di madrasah Diniyyah di lembaga yang sama, sedangkan pendidikan Menengah di MTsN Kudus (1989-1992) dan di SMA NU Al Ma'ruf Kudus (1992-1995). Pendidikan kesarjanaanya diperoleh dari jurusan Administrasi Negara FISIP UNDIP Semarang, (1995-1999) dan gelar master diperoleh dari Jurusan Sosiologi FISIP UGM (2005-2007) dan dari Magister Administrasi Publik (MAP) konsentrasi kebijkan Publik, UNDIP Semarang (2009-2011).

Sejak tahun 2000 ibu berputri satu ini mengajar di STAIN Kudus, juga aktif di beberapa organisasi, seperti Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Kudus, Forum PSG Jawa Tengah, Fatayat NU Kudus, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan Kudus (L@PPiS), Kaukus Perempuan Politik Indonesis (KPPI) Kudus, MUI Kabupaten Kudus, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kudus, Tim Teknis Kelompok Kerja Kudus Kabupaten Layak Anak, dan anggota kelompok kerja tim perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Kudus.

Selain berorganisasi, alumni PMII & IPPNU ini juga aktif melakukan berbagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, antara lain: Ketua Tim *Participatory Action Research* (PAR) di MTs Safinatul Huda Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara, kerjasama Ditjend Perguruan Tinggi Agama Islam (Ditpertais) Departemen Agama RI, Tahun 2006; Anggota peneliti 'Profil Perempuan Cacat dan Lansia Provinsi Jawa Tengah', kerjasama Forum PSG Jawa Tengah & Biro Pemberdayaan Perempuan Jawa tengah, Tahun 2007; Anggota peneliti 'Analisa Gender terhadap Kebijakan Pemberantasan Buta di Jawa Tengah', kerjasama Forum PSG Jawa Tengah &

Dipindai dengan CamScanner

Biro Pemberdayaan Perempuan Jawa tengah, Tahun 2008; Ketua Tim Pemberdayaan Perempuan Komunitas Miskin Kota di Perumahan Sosial Pecinan, Hadipolo, Jekulo, Kudus melalui Pendidikan Berbasis Realitas, kerjasama Diktis, Depag RI, Tahun 2008; Ketua Tim peneliti PAR dengan Judul "Merebut Hak atas Pendidikan yang Membebaskan: Program Pemberdayaan Pendidikan Keluarga dalam Komunitas Sedulur Sikep di Desa Kaliyoso Kec. Undaan, Kab. Kudus", kerjasama Diktis RI Tahun 2009; Anggota peneliti 'Kajian Gender dan Lingkungan di Jawa Tengah', kerjasama Forum PSG Jawa Tengah & BP3AKB, Tahun 2009; Peneliti utama tentang 'Politik Uang di Mata Perempuan', didanai DIPA STAIN Kudus, Tahun 2009; Ketua Tim "Program Pemberdayaan Perempuan Komunitas Miskin Kota di Perumahan Sosial Pecinan, Hadipolo, Jekulo, Kudus melalui Pembentukan Usaha Bersama", kerjasama Diktis, Kemenag RI, Tahun 2010; dan Ketua Tim "Program Pemberdayaan Perempuan Pembuat Genteng di Desa Ngembalrejo Kabupaten Kudus", kerjasama PSG STAIN Kudus dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Kabupaten Kudus, Tahun 2010; Anggota tim peneliti 'Problematika Perempuan Pengupas Ikan di Juwana Kabupaten Pati', Diktis Kemenag RI; 2011; dan anggota Tim Peneliti, "PENCARIAN IDENTITAS DI TENGAH KONFLIK PENDIDIKAN": Pemberdayaan Komunitas Pemulung dalam Mengembalikan Fungsi Madrasah di Kompleks Pecinan, Hadipolo, Jekulo, Kudus, Jawa Tengah; (Diktis Kemenag RI); Tahun 2011.

Tulisan yang telah diterbitkan, antara lain: 'Orientasi Politik Perempuan Marginal', pada Tahun 2009, 'Salah Kaprah Gender', Tahun 2010, Mewujudkan Kebijakan Publik Ramah Perempuan, Tahun 2011. Untuk urusan akademik, dapat dihubungi di email: dewimalaiha@yahoo.com.

Dipindai dengan CamScanner

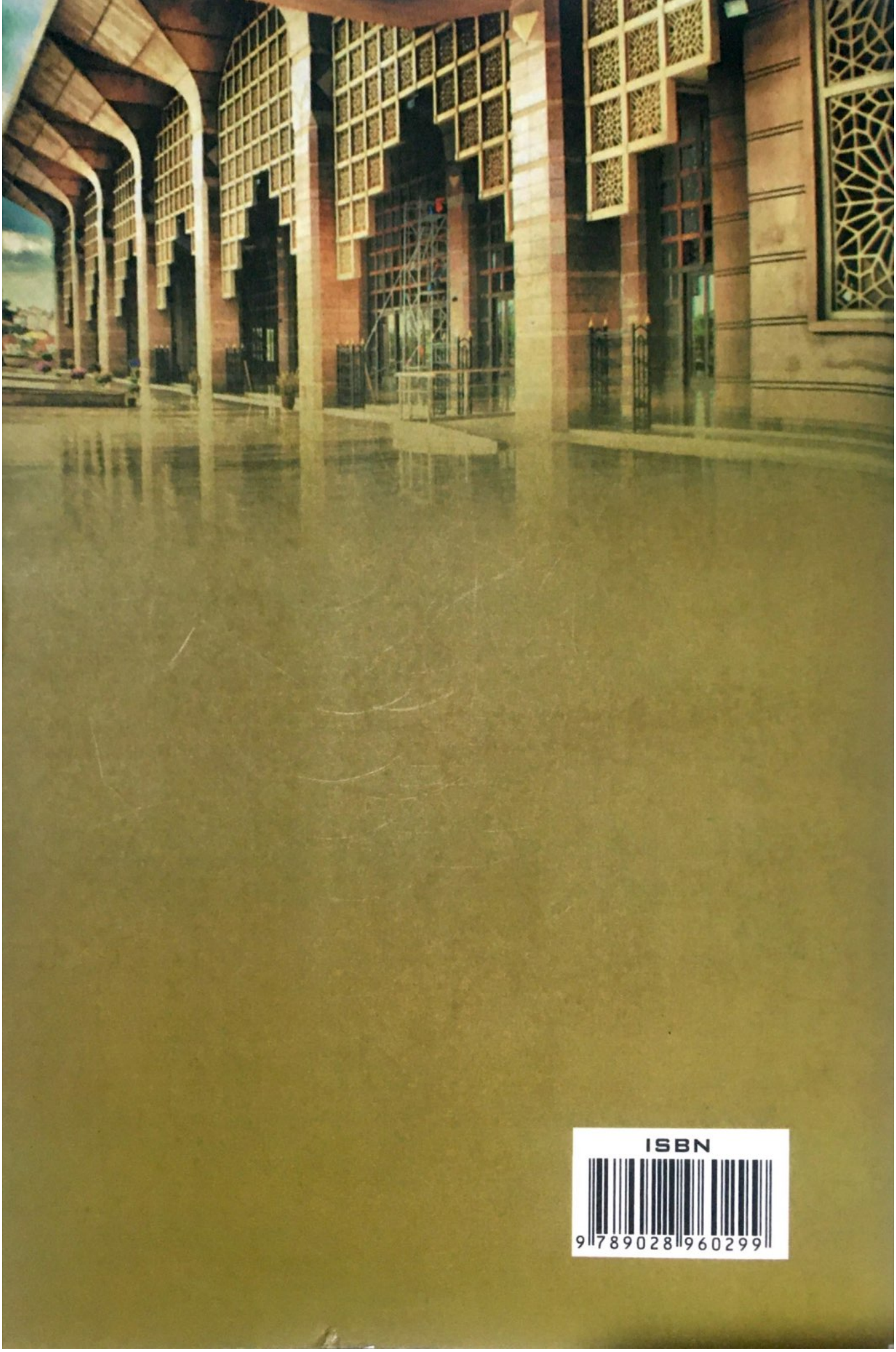

ISBN
9 789028 960299

Dipindai dengan CamScanner